



**LAPORAN KINERJA TW IV
TAHUN 2024**

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN LUWU TIMUR**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, dan atas rahmat serta karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja TW IV Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur yang telah memasuki tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategi (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur periode Tahun 2021-2026 telah selesai.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menggambarkan capaian kinerja Sekretariat DPRD dalam kurun Triwulan terkait keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta upaya penyelesaian dari setiap kendala yang dihadapi pada Sekretariat DPRD sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026 maupun RPJMD Tahun 2021- 2026. Selain itu, Laporan Kinerja Pemerintah merupakan wadah sebagai alat ukur tingkat keberhasilan dari pencapaian kinerja selama 1 tahun sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian kinerja di tahun yang akan datang.

Kami berharap, Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh jajaran Sekretariat DPRD.

Malili, Januari 2024
Sekretaris DPRD,


AGWAN AZIS, S.Pi.M.Si
Pembina TK I
NIP. 197603162008031001

DAFTAR ISI

hal.

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	2
1.3 Sumber Daya Manusia	7
1.4 Isu Strategis/Permasalahan Utama Perangkat Daerah.....	9
1.5 Strategi Organisasi	10
1.6 Landasan Hukum	10
1.7 Sistematika Penulisan	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026.....	13
2.2 Tujuan dan Sasaran	16
2.3 Strategi dan Arah Kebijakan	21
2.4 Perjanjian Kinerja Utama	22
2.5 Rencana Anggaran	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	32
3.1 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD KAB. Luwu Timur.....	34
3.2 Analisis Capain Kinerja	35
BAB IV PENUTUP.....	89
4.1 Kesimpulan.....	89
4.2 Langkah Perbaikan Kinerja.....	90
4.3. Saran	91

BAB 1**PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten /kota. Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja TW IV adalah Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur maka Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur memiliki kewajiban untuk membuat dan menyusun Laporan Laporan Kinerja Triwulan IV). Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. akuntabilitas dan efektivitas dari kebijakan dan program serta menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah. Dengan demikian substansi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan pada hasil capaian indikator kinerja lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Pembentukan Organisasi Sekretariat DPRD ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tuga dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Luwu Timur

Berdasarkan Peraturan tersebut, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

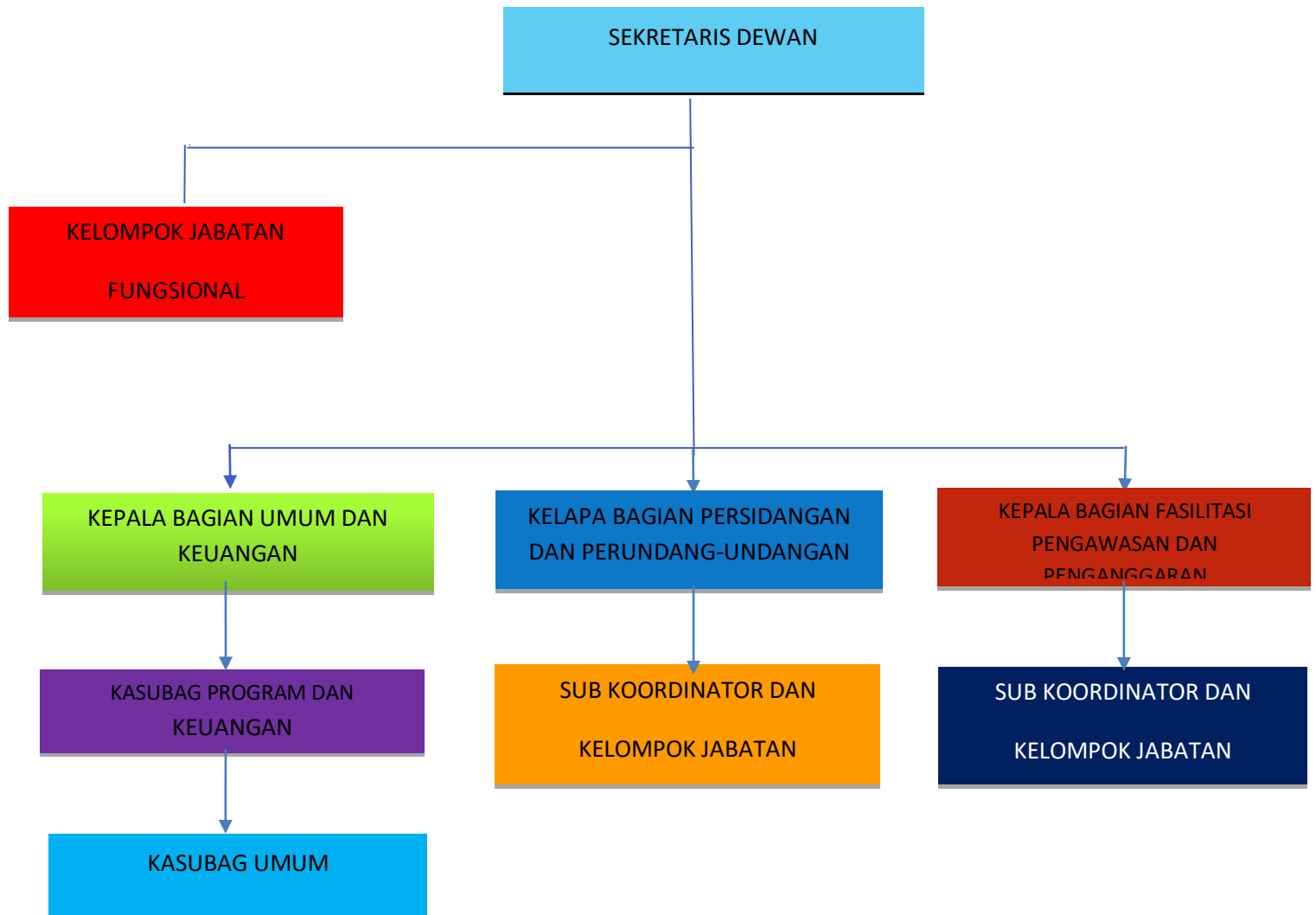
Tugas : Membantu Bupati dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli

yang diperlukan DPRD;

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

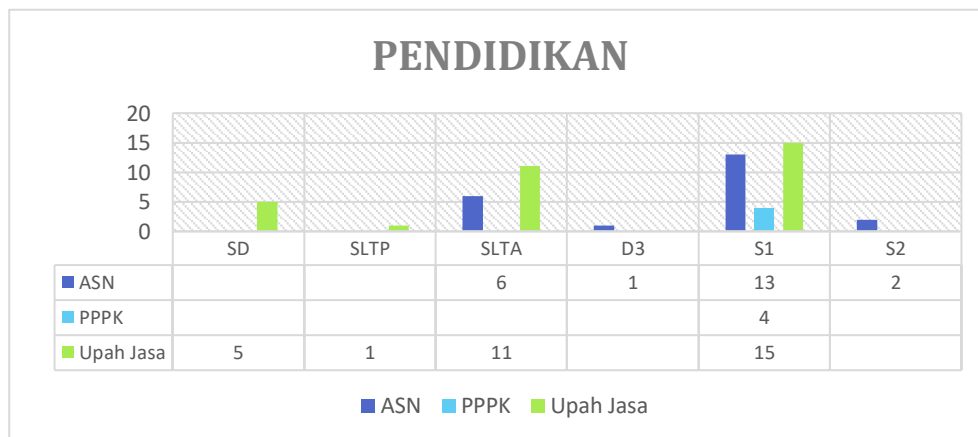


1.3 Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, berdasarkan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 51 orang, terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) 23, PPPK 4 orang dan Tenaga Upah Jasa 24 orang (Tenaga Administrasi 19 orang dan Sopir 5 orang). Struktur tingkat pendidikan SDM Sekretariat DPRD Daerah Kabupaten Luwu Timur tercantum pada diagram berikut :

Grafik. 1

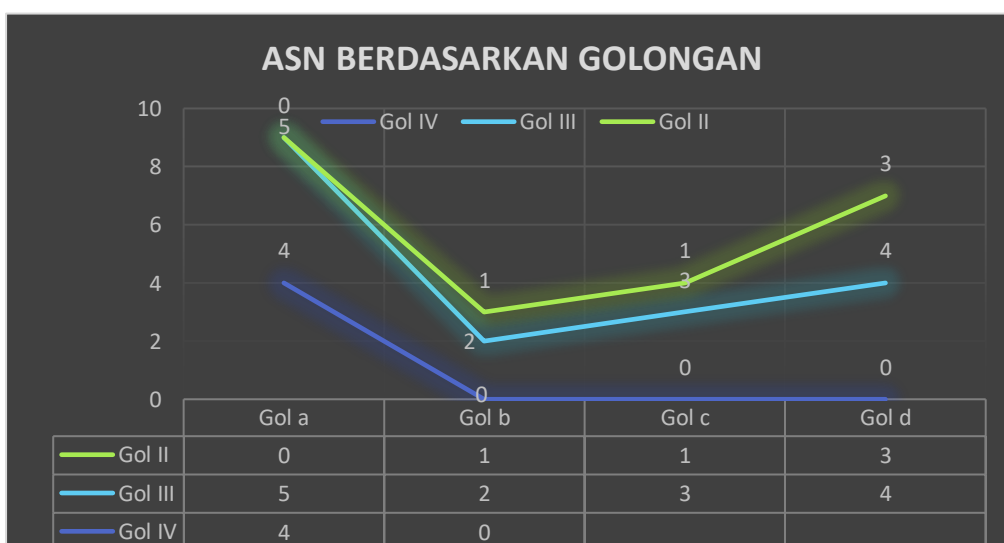
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024



Sumber : Sub Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur, Desember 2024

Grafik. 2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Sekretariat DPRD
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024



Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah . Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

1.4 Isu Strategis/Permasalahan Utama Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat isu-isu strategis antara lain:

1. Pemahaman yang berbeda antara sekretariat DPRD dan DPRD terhadap penerapan peraturan dan perundang-undangan dalam implementasi kerja kegiatan-kegiatan DPRD.
2. Penyebarluasan teknologi yang tepat guna sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya masi belum optimal sehingga penggunaan tekhnologi tepat guna kualitas dan kuantitasnya masih relatif sedikit.
3. Rencana Kerja yng telah di tentukan selalu berubah tidak sesuai jadwal yang telah di tentukan.
4. Tuntutan pelaksanaan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari segenap anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD, merupakan tantangan yang harus direspons dengan baik, melalui dukungan kinerja staf Sekretariat DPRD berupa pemikiran dan gerak pelaksanaan yang cepat dan tepat.

1.5 Strategi Organisasi

Peningkatan kinerja Sekretariat DPRD berkaitan dengan bagaimana ketersediaan sumber daya dan strategi pelaksanaan kegiatan pemerintahan sehingga permasalahan yang timbul bisa teratasi. Hal ini merupakan strategi kebijakan, kegiatan dan program, serta pemanfaatan sumber daya dalam upaya memecahkan permasalahan-permasalahan yang berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi.

Sekretariat DPRD telah melakukan usaha dari berbagai aspek yang memberikan peningkatkan kinerja organisasi. Untuk aspek internal, Sekretariat DPRD

melakukan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur, penyediaan sarana dan prasarana pendukung pencapaian kinerja dalam melakukan tugas, bimbingan teknis dan sosialisasi.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala terhadap kegiatan yang telah ditetapkan untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan Sekretariat DPRD serta pembinaan organisasi ke arah birokrasi yang profesional.

1.6 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
4. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tuga dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Luwu Timu.

1.7 Sistematika Penulisan

Bab. I - Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, gambaran umum perangkat daerah, sumber daya aparatur, permasalahan utama dan isu strategis perangkat daerah, dasar hukum penyusunan LKIP dan sistematika penyajian LKIP.

Bab II - Perencanaan Kinerja

Menjelaskan muatan Renstra 2016 – 2021 (Renstra hasil reviu) tujuan, sasaran, indikator dan target renstra selama lima tahun, lalu penjelasan target IKU lima tahun yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023.

Bab III - Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disampaikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja yang dimaksud sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV – Penutup

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023, permasalahan dan kendala secara umum yang dihadapi, upaya penyelesaiannya serta langkah, solusi dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

BAB 2**PERENCANAAN
KINERJA****2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026**

Peningkatan kualitas sistem akuntabilitas selalu menjadi perhatian utama setiap perangkat daerah, termasuk Sekretariat DPRD. Peningkatan ini terlihat dari penajaman program pada Renstra 2021– 2026.

Sekretariat DPRD Menyusun rencana strategis tahun 2021-2026 berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026 dengan fokus pada program dan kegiatan yang menjadi kewenangannya. Rencana strategi disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 1 – 5 tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis. Dalam rencana strategik disusun suatu visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan sasaran yang disesuaikan dengan tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dengan mempertimbangkan kemampuan yang ada.

 Visi dan Misi **Visi**

Visi merupakan landasan keyakinan serta mendorong dan mengarahkan tindakan yang akan dilaksanakan suatu organisasi. Dalam menetapkan visi, Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal, serta kebijakan baik kebijakan nasional, regional maupun lokal. Oleh karena itu diharapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur sebagai pengawal yang tangguh dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur guna mencapai Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur.

Dengan demikian, Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur menetapkan Visi sebagaimana Visi Kabupaten Luwu Timur, yaitu : **“LUWU TIMUR YANG**

BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA". Dalam rumusan visi ini terkandung kata kunci sebagai pokok visi yang saling terkait sebagai sebuah kesatuan cita-cita pembangunan, yakni "Berkelanjutan", "Lebih Maju", dan "Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya". Makna atau penjelasan dari setiap pokok visi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Visi	Pokok Visi	Penjelasan Visi
"Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya"	"Berkelanjutan"	Mengandung makna bahwa apa yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari masa lalu. Demikian juga bahwa apa yang dilakukan di hari esok merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan hari ini. Di alam proses yang berkelanjutan tersebut dapat diambil pelajaran, bahwa apa yang baik di masa lalu dapat diteruskan ke masa depan. Kemudian apa yang buruk di masa lalu, hendaknya menjadi hikmah untuk perbaikan di masa depan. Demikian halnya bahwa dengan berkelanjutan dimaksudkan agar apa yang dilakukan saat ini dan beberapa tahun kedepan, hendaknya mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang. Salah satu aspek penting dari keberlanjutan adalah ketersediaan sumber daya alam yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tetapi juga memperhatikan generasi berikutnya. Dengan demikian penekanan pokok visi ini adalah keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
	"Lebih Maju"	Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan ke depan diupayakan agar hasilnya menjadi lebih baik dari capaian di masa lalu. Capaian-capaian yang menggembirakan di masa lalu, tidak boleh membuat Luwu Timur menjadi lengah, melainkan sejatinya menjadi motivasi untuk terus bergerak menjadi lebih baik lagi. Demikian juga terhadap apa yang masih kurang dan menjadi kelemahan di masa lalu, menjadi pemberi semangat agar di masa depan Luwu Timur berbenah atas kekurangan dan kelemahan tersebut. Sehingga dapat berbalik menjadi keunggulan daerah. Aspek penting yang terkandung dalam pokok visi maju adalah kesejahteraan masyarakat secara umum.
	"Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya"	Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk lebih maju hanya akan terwujud ketika nilai-nilai agama dan budaya hadir pada setiap langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan

Sumber : Dokumen RPJMD Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026



Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh suatu organisasi sesuai dengan visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksanakan dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh aparatur pemerintahan serta pihak yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui peran yang diemban dan program-program yang ditetapkan serta hasil yang akan dicapai pada masa mendatang.

Untuk bisa mewujudkan visi tersebut dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan kedepan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (Enam) misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh.
- b. Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas
- c. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas.
- d. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik.
- e. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat.
- f. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya.

Dalam upaya mewujudkan misi tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur melaksanakan **misi ke-4 (Empat)**, dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yaitu :

1. Misi IV yaitu : **Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik.**

Melalui Misi tersebut, diharapkan bahwa program kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur akan tercipta suatu program secara terpadu dan menyeluruh.

2.2 Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD tahun 2021-2026 mengacu pada Misi ke 4, tujuan dan sasaran yang ada pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, yaitu :

- Misi ke 4 : Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik
- Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani
- Sasaran : Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Dalam upaya mendukung capaian kinerja RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, Sekretariat DPRD sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab menetapkan tujuan dan sasaran organisasi yaitu :

- Tujuan : Meningkatkan kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD Bagi Peningkatan Kapasitas /Kinerja DPRD.
- Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Lebih Baik.
- Indikator : a) Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda dengan target 100%.
b) Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti Target 100%
- Tujuan : Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Sekretariat DPRD
- Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD
- Indikator : Nilai SAKIP.

Berdasarkan hasil pendampingan dari Menpan, dimana dalam menyusun kinerja mengacu pada PermenPAN-Rb Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Sekretariat DPRD melakukan revisi/perbaikan pada sasaran dan indikator sasaran. Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Sekretariat DPRD ada 2 (dua) yaitu :

1. Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Lebih Baik dengan Indikator Persentase

- Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda dan Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD, dengan indikator Nilai SAKIP (hasil evaluasi internal Inspektorat).

Berikut ini adalah sasaran dan indikator sasaran Sekretariat DPRD sesuai dokumen Renstra periode Tahun 2021-2026 (sebelum dilakukan perubahan mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 89 Tahun 2021).

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI	Target Kinerja pada Tahun				
				AWAL 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD Bagi Peningkatan Kapsitas /Kinerja DPRD	Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Lebih Baik	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah	80%	90%	90%	100%	100%	100%
			Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	100%	100%	100%
2.	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Perangkat Daerah		Rata-rata capaian program PD	64,71	75	75	80	80	85

Berikut perubahan/perbaikan sasaran dan indikator sasaran sesuai hasil pendampingan dari Menpan dengan mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 89 Tahun 2021.

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur
(Versi PermenPAN-RB No. 89 Tahun 2021)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI	Target Kinerja pada Tahun				
				AWAL 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD Bagi Peningkatan Kapsitas /Kinerja DPRD	Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Lebih Baik	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda	72,27%	90%	90%	100%	100%	100%
			Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	83,33%	90%	90%	100%	100%	100%
2.	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP	64,71	75	75	80	80	85

2.1.1 Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024

SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG
Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Lebih Baik	1) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Kegiatan 2) Pembentukan Peraturan Daeran Dan Peraturan DPRD 3) Pembahasan Kebijakan Anggaran
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	1. Program penunjang urusan pemerintah daerah kab/ kota : 1) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD 2) Administrasi keuangan PD

	3) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5) Administrasi Umum PD 6) Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 9) Layanan Keuangan Dan Kesejahteraan DPRD 10) Layanan Administrasi DPRD
--	--

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Sekretariat DPRD dalam merealisasikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat ditempuh dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal, sebagai berikut :

1. Sasaran strategis Meningkatkan Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD melalui dukungan Administrasi
2. Sasaran strategis Meningkatkan kinerja kesekretariatan dalam mendukung fungsi pengawasan dan Anggaran dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
3. Sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah dengan strategi pemenuhan dokumen perencanaan sesuai ketentuan, penguatan monitoring capaian kinerja pegawai dan organisasi setiap triwulan/tahunan, penguatan tindak lanjut hasil monitoring, dan penguatan laporan kinerja pegawai sesuai ketentuan.

Sedangkan arah kebijakan Sekretariat DPRD untuk mencapai tujuan dan sasaran yaitu :

1. Sasaran strategis Menciptakan upaya-upaya peningkatan mutu administrasi dan fasilitasi Sekretariat DPRD yang memadahi dalam menunjang kegiatan DPRD yang dilandasi dengan komitmen dalam rangka mewujudkan visi dan

- misal Kab.Luwu Timur. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.
2. Sasaran strategis Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya.
 3. Sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah dengan arah kebijakan peningkatan kualitas perencanaan sesuai ketentuan, peningkatan monitoring capaian kinerja pegawai dan organisasi setiap triwulan/tahunan, peningkatan tindak lanjut hasil monitoring, dan peningkatan kualitas laporan kinerja pegawai sesuai ketentuan.

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan suatu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran.

Sesuai hasil pendampingan dari Kemenpan dimana berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa dalam penyusunan kinerja harus dimulai dengan penetapan sasaran kinerja yang ingin dicapai OPD (Outcome) dan selanjutnya mengidentifikasi faktor penyebab dan kondisi yang diperlukan (CSF) dan menguraikan CSF tersebut atau hal-hal yang dapat mendukung untuk pencapaian sasaran OPD tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka Sekretariat DPRD melakukan penyusunan Perjanjian kinerja yang berbasis kinerja (Pohon Kinerja). Penyusunan PK 2024 Sekretaris DPRD mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 89 Tahun 2021 dengan memperhatikan Renstra, Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024, IKU dan anggaran.

Berikut ini Perjanjian Kinerja (PK) Sekretaris DPRD sebagai sebuah Organisasi Perangkat Daerah :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Sekretariat DPRD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan, Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda	100%
		Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	100%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP	80

Program dan Pagu Anggaran Pokok Tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN POKOK (Rp)	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	28.609.615.323	APBD
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	16.204.282.236	APBD
	J U M L A H	44.813.897.559	APBD

Berikut ini penjelasan penetapan sasaran, indikator sasaran dan target yang ditetapkan Sekretariat DPRD Tahun 2024.

Tabel 2.5
Penjelasan atas Sasaran, Indikator Sasaran dan Target yang Ditetapkan

NO	SASARAN	PENJELASAN
1	Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan, Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Yang dimaksud dengan Sasaran Kinerja ini adalah Meningkatkan fungsi legislasi, yang berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, fungsi pengawasan yaitu mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah. Dan fungsi anggaran yaitu kewenangan dalam hal anggaran daerah APBD. Membantu Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat mendukung kelancaran fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan Penganggaran. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor : Tahun 2021 Tentang : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.
NO.	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras untuk menggambarkan pencapaian kinerja. untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik, serta untuk mendapatkan umpan balik (feedback) secara berkala atas pencapaian kinerja/kualitas pelayanan di Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur kepada masyarakat khususnya OPD yang mengajukan ranperda sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang selanjutnya secara berkesinambungan
NO.	TARGET	PENJELASAN
1	100%	- Target Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda diharapkan meningkat dari tahun sebelumnya. Target Tahun 2023 capaian Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda 88,89% atau 15 Ranperda yang ditargetkan dan terealisasi 12 Ranperda menjadi Perda. - Persentase Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda yang ditetapkan menjadi Perda di tahun 2024 ditargetkan 100% dan dalam pelaksanaannya dari 13

		Ranperda yang ditargetkan terealisasi 69, 23%. Dikarenakan, adanya kelebihan penentuan target ranperda yang seharusnya 12 ranperda saja. Dan dari 12 ranperda yang telah terfasilitasi pembahasannya hanya 9 Ranperda yang di teapkan menjadi Perda.
NO.	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
2.	Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	Bertujuan untuk mengukur sejauh mana fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD , baik itu Komisi DPRD, Badan Anggaran, Bapemperda dan Badan Kehormatan. terhadap pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur baik yang sedang berjalan maupun yang sudah dilaksanakan Pengawasan dilakukan melalui kunjungan kerja, Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan kegiatan lainnya berdasarkan bidang tugasnya masing – masing. Dari hasil kegiatan tersebut sesuai kebutuhan maka dirumuskan Rekomendasi yang harus disampaikan kepada Pemerintah daerah dalam hal ini Instansi terkait.
NO.	TARGET	PENJELASAN
2.	100 %	Target Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti diharapkan meningkat dari tahun sebelumnya. Tahun 2024 Sekretariat DPRD telah Mencapai Target 100%. Dengan Rekomendasi yang telah di tindaklanjuti
NO	SASARAN	PENJELASAN
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Sakip adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan kinerja dan pengukuran pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Implementasi SAKIP merupakan bagian dari transformasi cara dan budaya kerja melalui penerapan manajemen kinerja sektor publik dan anggaran berbasis kinerja
NO.	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	Nilai SAKIP	Inspektorat merupakan salah satu Tim Sakip Kabupaten, dimana hasil penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang di sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Lakip (LHE Lakip) merupakan bentuk evaluasi atas penilaian akuntabilitas pada OPD

NO.	TARGET	PENJELASAN
1.	80	Target yang ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, tahun 2023 capaian Lakip hasil evaluasi Inspektorat untuk DPRD adalah 76,85 sehingga sebagai komitmen mendukung target Kabupaten maka pada tahun 2024 Sekretariat DPRD meningkatkan target capaian.

Perjanjian kinerja pada Sekretariat DPRD pada tahun 2024 mengalami perubahan. Perjanjian kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Sekretaris DPRD pada bulan Januari 2024, kemudian dilakukan revisi pada bulan Oktober 2023 untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukan revisi adalah :

1. Perbaikan indikator kinerja utama menjadi lebih spesifik, realistis, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran strategis atau indikator kinerja tersebut belum SMART sehingga dilakukan perbaikan.
2. Perbaikan indikator kinerja “nilai SAKIP” untuk mengukur akuntabilitas kinerja OPD.
3. Terjadinya perubahan anggaran, sehingga membutuhkan penyesuaian pada Sekretariat DPRD Tahun 2024.

2.4 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Sekretariat DPRD telah menetapkan IKU yang menjadi pedoman dalam upaya mencapai kinerja, sebagai berikut :

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026
(Permenpan Nomor 89 Tahun 2021)

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	Penanggungjawab
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD Bagi Peningkatan Kapasitas /Kinerja DPRD	Persentase Kinerja Sekretariat DPRD bagi Peningkatan Kinerja DPRD	Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Lebih Baik	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda	Jumlah Ranperda Yang ditetapkan di bagi dengan Jumlah ranperda yang difasilitasi unuk dibahas dikali 100 %	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan , dan dari OPD yang mengusulkan Ranperda.
				Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi yang ditindak lanjuti dibagi Jumlah Rekomendasi DPRD dikali 100 %	Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Fasilitasi Penganggaran

Berdasarkan pemahaman diatas maka IKU Sekretariat DPRD 2021-2026 adalah sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL/ FORMULASI PERHITUNGAN	PENJELASAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Lebih Baik	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda	Jumlah Ranperda Yang ditetapkan di bagi dengan Jumlah ranperda yang difasilitasi unuk dibahas dan dikali 100 %	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap selaras untuk menggambarkan pencapaian kinerja. untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik, serta untuk mendapatkan umpan balik (feedback) secara berkala atas pencapaian kinerja/kualitas pelayanan di Sekretariat	- Bagian Persidangan dan Perundang-undangan - OPD terkait

			DPRD Kabupaten Luwu Timur kepada masyarakat khususnya OPD yang mengajukan ranperda sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang selanjutnya secara berkesinambungan	
	Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi yang ditindak lanjuti dibagi Jumlah Rekomendasi DPRD dikali 100 %	Bertujuan untuk mengukur sejauh mana fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD, baik itu Komisi DPRD, Badan Anggaran, Bapemperda dan Badan Kehormatan. terhadap pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur baik yang sedang berjalan maupun yang sudah dilaksanakan Pengawasan dilakukan melalui kunjungan kerja, Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan kegiatan lainnya berdasarkan bidang tugasnya masing – masing. Dari hasil kegiatan tersebut sesuai kebutuhan maka dirumuskan Rekomendasi yang harus disampaikan kepada Pemerintah daerah dalam hal ini Instansi terkait.	- Sekretariat DPRD - OPD terkait

2.5 Rencana Anggaran

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pokok, anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2024 sebesar **Rp. 50.591.755.255,-** terdiri dari belanja pegawai **Rp 19.780.193.869,-** belanja barang dan jasa **Rp. 28.006.138.786,-** belanja Modal

Peralatan dan Mesin **Rp. 1.277.922.600,-** dan belanja modal Gedung dan Bangunan **Rp 1.527.500.000,-**. dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Adapun program dan anggaran APBD secara lengkap disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.7
Program dan Pagu Anggaran APBD-P Tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	28.743.131.819,-	APBD
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	21.848.623.436,-	APBD
J U M L A H		50.591.755.255,-	

Alokasi anggaran pada Sekretariat DPRD Tahun 2024 yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel
Alokasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis
Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	ANGGARAN (Rp)
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD Bagi Peningkatan Kapasitas /Kinerja DPRD	Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	21.848.623.436

2.	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan Perangkat Daerah		Rata-rata capaian program PD	28.743.131.819
----	--	--	------------------------------	----------------

Sumber : DPAP Sekretariat DPRD TA. 2024

Sekretariat DPRD memiliki 1 (satu) tujuan dengan 2 (dua) sasaran, dan untuk mengukur keberhasilan dari sasaran tersebut Sekretariat DPRD menetapkan 3 (tiga) indikator. Untuk mendukung keberhasilan pencapaian tujuan/ sasaran yang telah ditetapkan, Sekretariat DPRD didukung 2 (dua) program dengan 18 (Delapan belas) kegiatan dan **56 (lima puluh enam)** sub kegiatan. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh anggaran belanja yang ada yaitu sebesar **Rp. 46.488.337.755,-** digunakan untuk sepenuhnya mendukung sasaran “Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Lebih Baik dan “Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD”.

BAB 3**AKUNTABILITAS
KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur selaku pengemban amanah, melaksanakan kewajiban berauntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja TW IV Tahun 2024 Kabupaten Luwu Timur yang dibuat sesuai ketentuan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239 tahun 2003.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang amat penting bagi suatu organisasi, pengukuran kinerja menurut Lynch dan Cross (1993) dalam Sony Yuwono dkk (2006:29) bermanfaat untuk:

- a. Menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga akan membawa Instansi lebih dekat pada pelanggannya dan membuat seluruh orang dalam organisasi terlibat dalam upaya memberi kepuasan kepada pelanggan.
- b. Memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari mata rantai pelanggan dan pemasok internal.
- c. Mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya pengurangan terhadap pemborosan tersebut.
- d. Membuat suatu tujuan strategis yang biasanya masih kabur menjadi lebih konkret sehingga mempercepat proses pembelajaran organisasi.
- e. Membangun konsensus untuk melakukan suatu perubahan dengan memberi "reward" atas perilaku yang diharapkan tersebut.

Sekretariat DPRD selaku pelaksana sebagian kebijakan Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah. Dalam memberikan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok yang diberikan, diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja TW IV (LKJ) dengan

berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 (Permenpan dan RB).

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dan tujuan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur, akan dilakukan analisis capaian kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	$91 \leq 100 \%$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90 \%$	Tinggi

3.	$66 \leq 75 \%$	Sedang
4.	$51 \leq 65 \%$	Rendah
5.	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

3.1 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur

Pencapaian sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur yang dicerminkan dalam pencapaian indikator kinerja. Adapun capaian kinerja secara rinci untuk setiap indikator kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Sekretariat DPRD Kab. Luwu Timur
TW IV Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian	Predikat Kinerja
1.	Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan, Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda	Persen	100%	69,23%	69,23%	Sedang
		Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	Persen	100%	100%	100%	ST

2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP	Nilai	75	76,85	102,47	ST
----	---	-------------	-------	----	-------	--------	----

Dari 2 (dua) sasaran strategis dan 3 (Indikator) yang diperjanjikan di Tahun 2024,

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Dalam sub bab ini disajikan pencapaian sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur yang dicerminkan dalam pencapaian indikator kinerja. Adapun capaian kinerja secara rinci untuk setiap indikator kinerja diuraikan sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS I

“Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Lebih Baik”

Indikator I

” Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda”

Sasaran strategis ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja, yaitu Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda, dengan capaian kinerja dari indikator tersebut disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1
Target Terhadap Realisasi
TW III Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian
1	Persentase Fasilitasi Pembahasan	Persen	100%	69,23%	69,23%

	Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda				
Rata-rata Capaian Kinerja		69,23% (Sedang)			

Analisis capaian kinerja sasaran strategis “ Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Lebih Baik berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Target kinerja dan realisasi kinerja capaian Presentase Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4

Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Capaian Presentase Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Lebih Baik Pada Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian
1	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda	Persen	100%	69,23%	69,23%
Rata-rata Capaian Kinerja			69,23% (Sedang)		

Pada tabel diatas menunjukkan realisasi kinerja sasaran pertama dengan indikator kinerja **Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda**, target yang ditetapkan di TW IV 100 % dan

terrealisasi 69,23%, dimana Jumlah fasilitasi Pembahasan ranperda yang ditetapkan menjadi perda ditargetkan di TW IV sebanyak 13 ranperda. Dikarenakan, adanya kelebihan penentuan target ranperda yang seharusnya 12 ranperda saja. Dan dari 12 ranperda yang telah terfasilitasi pembahasannya hanya 9 Ranperda yang di teapkan menjadi Perda. Metode pengukuran indikator kinerja tersebut yaitu berdasarkan data yang didapatkan dari *Bagian Persidangan dan Perundang-undangan*.

Tabel 3.5

Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda
di Kabupaten Luwu Timur sampai dengan TW IV Tahun 2024

SK	URAIAN	KETERANGAN
SK No. 19 Tahun 2023 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2024 Terdapat 12 (dua belas) buah Ranperda	1. Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 (Tanggal 7 Mei 2024)
	2. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Luwu Timur T.A. 2023	PERDA NOMOR 2 TAHUN 2024 (13 Agustus 2024)
	3. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.	PERDA NOMOR 3 TAHUN 2024 (30 Agustus 2024)
	4. Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah T.A 2024	PERDA NOMOR 4 TAHUN 2024 (20 September 2024)
	5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Luwu Timur 2025-2045.	PERDA NOMOR 5 TAHUN 2024 (25 November 2024)
	6. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren	PERDA NOMOR 6 TAHUN 2024 (17 Desember 2024)

7. Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi Dan Anak Balita	PERDA NOMOR 7 TAHUN 2024 (17 Desember 2024)
8. Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.	PERDA NOMOR 8 TAHUN 2024 (17 Desember 2024)
9. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kab. Luwu Timur T.A 2025	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2024 (30 Desember 2024)
10. Penyesuaian Kecamatan Kalaena dan Kecamatan Angkona	Ranperda ini ditarik sesuai surat dari Bupati Nomor 100.32/0220/Bup tanggal 7 November 2024
11. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2039.	Proses pembahasannya dilanjutkan ke tahun 2025
12. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur (lanjutan).	Lap. Pansus, Paripurna tgl 23 Desember 2024. (masih proses permintaan Nomor Registrasi ke Biro Hukum oleh Bagian Hukum)

Penjelasan :

- Ranperda Penyesuaian Kecamatan Kalaena dan Kecamatan Angkona : Sesuai surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1-1/8000/SJ tentang Penundaan Moratorium Pemberian dan Pemutahiran Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
- **Ranperda RPIK** : Proses pembahasan ranperda tersebut akan dilanjutkan pada Tahun 2025 (SK Propemperda Tahun 2025).
- Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur (lanjutan). Lap. Pansus, Paripurna tgl 23

Desember 2024. (masih proses permintaan Nomor Registrasi ke Biro Hukum oleh Bagian Hukum)

- Perda yang ditetapkan Tahun 2024 sebanyak 9 buah Ranperda

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir (5 Tahun berturut-turut 2019 - 2023)

Peningkatan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dilakukan dengan melihat dan membandingkan pencapaian indikator sasaran pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Adapun capaian Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda Kabupaten Luwu Timur selama 5 (lima) tahun berturut-turut (2019 – 2023) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6

Capaian Presentase Meningkatnya Desa Mandiri
Target Terhadap Realisasi selama 5 (lima) Tahun
(2020 – 2024)

Indikator Kinerja 1	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
1	2	3	4	5	5
Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda	10,29%	71,43%	85,19%	88,89%	69,23%

Pengukuran kinerja dari tahun 2020-2024 menunjukkan peningkatan kinerja Presentase Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda dapat dilihat dari tabel diatas. Pada tahun 2020 diperoleh realisasi 10,29%, pada tahun 2021 mengalami peningkatan dengan realisasi 71,43%, pada tahun 2022 realisasi 85,19%, 2023 diperoleh realisasi 88,89% dan tahun 2024 diperoleh realisasi 69,23%. Target sebanyak 13 ranperda . Dikarenakan, adanya

kelebihan penentuan target ranperda yang seharusnya 12 ranperda saja. Dan dari 12 ranperda yang telah terfasilitasi pembahasannya hanya 9 Ranperda yang di teapkan menjadi Perda.

Di Tahun 2024 mengalami penurunan. Dikarenakan, adanya kelebihan penentuan target ranperda yang seharusnya 12 ranperda saja. Dan dari 12 ranperda yang telah terfasilitasi pembahasannya hanya 9 Ranperda yang di ditetapkan menjadi Perda.

3. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target RPJMD/ Renstra (2021-2026)

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur dibandingkan dengan Target Jangka Menengah (RPJMD/Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur (2021-2026) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Capaian Indikator Kinerja Strategis
Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur
Dibandingkan target RPJMD/Renstra 2021-2026

Indikator Kinerja	Target RPJMD/Renstra 2021-2026	Realisasi TW Sampai dengan Tw IV Tahun 2024	Presentase Capaian Kinerja
Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda	100%	69,23%	69,23%

Indikator Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda pada TW IV tahun 2024 diperoleh realisasi sebesar 69,23%, terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya target akhir jangka menengah. Hal ini mengindikasikan kinerja Sekretariat DPRD sudah pada jalur yang tepat dalam mencapai target RPJMD/Renstra 2021-2026.

4. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Capaian Daerah Lain

Salah satu cara untuk mengetahui Tingkat keberhasilan kinerja yang telah dicapai adalah dengan membandingkan realisasi kinerja yang telah dicapai dengan realisasi kinerja daerah/instansi lain.

Presiden Republik Indonesia dalam Visi dan Misinya menekankan Penyelenggaraan pemerintahan yang menitikberatkan pada 4 (empat) aspek, yakni :

1. Kegiatan yang efisiensi dan efektif
2. Keandalan laporan keuangan
3. Pengamanan asset
4. Ketaatan pada peraturan perundang-undangan

Ke-4 aspek tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 dan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Dimana pada aturan tersebut mengutamakan *hard control*, *soft control* tidak tersentuh (Integritas, Komitmen, Kepemimpinan dan Nilai Etika).

Mengenai perbandingan antara realisasi kinerja Dinas dan Standar Nasional Lainnya, tidak kami dapati indikator pembandingan yang setara untuk dilakukan Analisa Perbandingan. Namun, melihat pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupten Luwu Timur dan Sekretariat DPRD Kabupaten Lain **Belum ada**,

5. Analisa Penyebab keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang dilakukan

Pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja selama tahun 2024 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi sebagai bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis : **Persentase Fasilitas Pembahasan Peraturan Daerah**

yang di tetapkan menjadi Perda

Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda yaitu : 13 dokumen ranperda dan Terealisasi 12 Ranperda yang terfasilitasi pembahasannya dan 9 ranperda yang di tetapkan menjadi Perda dan 3 ranperda (ada satu Rnperda yang d tarik sesuai surat dari Bupati Nomor 100.32/0220/Bup tanggal 7 November 2024, satu ranperda dalam Proses pembahasannya di lanjutkan ke tahun 2025 dan 1 ranperda Lap. Pansus, Paripurna tgl 23 Desember 2024. (masih proses permintaan Nomor Registrasi ke Biro Hukum oleh Bagian Hukum) atau 69,23%, hal ini dikategorikan **Sedang** karena tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

- Tidak tercapainya target Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda didukung dengan ketersediaan anggaran serta adanya inisiatif dari Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD dalam upaya meningkatkan Fungsi Legislasi , dengan melakukan perbaikan atas kekurangan-kekurangan dalam pemenuhan tolak ukur dari tahun sebelumnya untuk lebih baik di tahun berikutnya.
- Selain keberhasilan, kegagalan/hambatan juga ditemui dalam proses tercapainya target, diantaranya yaitu :
 - Belum optimalnya aplikasi yang digunakan sehingga menghambat pelaksanaan tugas kesekretariatan DPRD.
 - Kurangnya SDM dalam pemenuhan variabel terkait ranperda yang diperlukan.
 - Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi dari masing-masing bidang terkait.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja merupakan penjelasan capaian indikator kinerja dari program-program pendukung sehingga dapat dilakukan identifikasi mana program yang berhasil

(capaian sesuai target) dan mana yang belum maksimal (capaian dibawah target). Berdasarkan hal tersebut, akan dilakukan tindak lanjut kepada program-program yang capaian tidak maksimal di tahun-tahun berikutnya.

Tabel 3.9

Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Capaian	Program	Indikator Kinerja	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian	Rencana Tindak Lanjut
Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Lebih Baik	Persentase Fasilitas Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda	69,23% (13 Ranperda realisasi 9 ranperda) =69,23%	Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Kegiatan Legislasi yang Fasilitas	100%	69,23%	69,23%	Dengan mengacu pada pencapaian tahun 2023, program ini akan tetap dilaksanakan pada tahun 2024

a) Penjelasan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sebagai berikut :

- Sasaran strategis 1 : **Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Lebih Baik**

Indikator Kinerja Persentase Fasilitas Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda dengan target 13 Ranperda atau 9 Ranperda menjadi perda telah berhasil terealisasi sebesar 69,23%

Adapun Program yang mendukung yaitu Program Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

b) Upaya perbaikan pada perencanaan berikutnya :

Beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk perencanaan berikutnya, sebagaimana hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD pada TW IV tahun 2024 yaitu :

1. Melakukan rapat koordinasi antara Sekretariat DPRD, Anggota DPRD dengan stakeholder terkait.
2. Memfasilitasi dan mendampingi langsung dalam pembahasan ranperda.

7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur dalam rangka mencapai tujuan berupaya efisiensi dalam melakukan kegiatannya. Sumber daya yang dimiliki Sekretariat DPRD adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Sekretariat DPRD dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Efisiensi adalah ukuran Tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya maka prosesnya dikatakan semakin efisien.

Dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, maka dialokasikan anggaran sebesar Rp. 11.186.480.986,- dari total anggaran yang dialokasikan di Sekretariat DPRD Tahun 2024 (tidak termasuk gaji dan tunjangan) untuk mencapai target indikator kinerja **Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda**, terealisasi sebesar Rp. 8.212.419.110,- , sehingga efisiensi anggarannya menggunakan rumus adalah :

$$= 100\% - \left\{ \frac{\text{Jumlah Realisasi Anggaran}}{\text{Jumlah Alokasi Anggaran}} \right\} \times 100\%$$

$$= 100\% - \frac{8.212.419.110}{11.186.480.986} \times 100\%$$

= 100% - 73,41%

= **26,59% Efisiensi Anggaran**

Indikator 2 : Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Target kinerja dan realisasi kinerja capaian Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti TW IV Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.11

Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja
Capaian Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti
Pada Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			TargetTW IV	Realisasi TW IV	Capaian
1	Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	Persen	100%	100%	100%

Pada tabel diatas menunjukkan realisasi kinerja sasaran pertama dengan indikator kinerja **Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti**, target yang ditetapkan 100% dan terealisasi 100%. Peningkatan ini tidak lepas dari upaya Sekretariat DPRD untuk memajukan Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran. Metode pengukuran indikator kinerja tersebut yaitu berdasarkan dari hasil pembahasan yang dilaksanakan bersama Eksekutif dan legislatif. Dan masih adanya kegiatan pembahasan APBD yang telah dilaksanakan di TW IV.

Capaian Indikator Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti

5. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir

Peningkatan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dilakukan dengan melihat dan membandingkan pencapaian indikator sasaran pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Adapun capaian Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti Kabupaten Luwu Timur selama 5 (lima) tahun berturut-turut (2020 – 2023) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.12

Capaian Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa
Target Terhadap Realisasi selama 2 (dua) Tahun
(2022 – 2023)

Indikator	Satuan	Tahun	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian
Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	Persen	2023	90%	100%	111,11%
		2024	100%	100%	100%

6. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target RPJMD/ Renstra (2021-2026)

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur dibandingkan dengan Target Jangka Menengah (RPJMD/Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur (2021-2026) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.13
Capaian Indikator Kinerja Strategis
Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur
Dibandingkan target RPJMD/Renstra 2021-2026

Indikator Kinerja	Target RPJMD/Renstra 2021-2026	Realisasi TW IV Tahun 2024	Presentase Capaian Kinerja
Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

7. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Capaian Daerah Lain

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator sasaran Sekretariat DPRD dengan target dan realisasi standar nasional sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.14
Realisasi Kinerja dan Standar Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional	
				Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024
1.	Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan, Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Lebih Baik	Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	100%	-	-

Pada Sekretariat DPRD, sasaran sasaran strategis Meningkatkan Pelayanan

Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik dengan indikator Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti tidak mengikuti standar nasional sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan.

8. Analisa Penyebab keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang dilakukan

Pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja selama tahun 2024 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi sebagai bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis : **Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik**

- Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti yaitu : 100%, dengan capaian 100% hal ini dikategorikan **sangat memuaskan/berhasil** telah tercapai.
- Target dapat tercapai dengan adanya dukungan anggaran untuk melaksanakan pembinaan dan pendataan secara rutin, Ini tergantung pada SKPD lain yang bersentuhan langsung dengan kegiatan yang berkaitan pembahasan anggaran.

9. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja merupakan penjelasan capaian indikator kinerja dari program-program pendukung sehingga dapat dilakukan identifikasi mana program yang berhasil (capaian sesuai target) dan mana yang belum maksimal (capaian dibawah target). Berdasarkan hal tersebut, akan dilakukan tindak lanjut kepada program-program yang capaian tidak maksimal di tahun-tahun berikutnya.

Tabel 3.15

Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Capaian	Program	Indikator Kinerja	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian	Rencana Tindak Lanjut
Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan, Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik	Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	100% (1 target di tw IV Pembahasan Kebijakan Anggaran realisasi) =100%	Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Kegiatan Legislasi yang Fasilitasi	100%	100%	100%	Dengan mengacu pada pencapaian tahun 2023, program ini akan tetap dilaksanakan pada tahun 2024

- a) Penjelasan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sebagai berikut :

Indikator 2 : **Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti**

Adapun Program yang mendukung yaitu Program Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

- b) Upaya perbaikan pada perencanaan berikutnya :

Beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk perencanaan berikutnya, sebagaimana hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD pada tahun 2024 yaitu :

1. Melaksanakan pembahasan Anggaran tepat waktu sesuai jadwal yang telah di tentukan.
2. Melakukan rapat koordinasi antara Sekretariat DPRD, Anggota DPRD dengan *stakeholder*.

10. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, maka dialokasikan anggaran sebesar Rp. 10.662.142.450,- dari total anggaran yang dialokasikan di Sekretariat DPRD Tahun 2024 (tidak termasuk gaji dan tunjangan) untuk mencapai target indikator kinerja **Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti**,

terrealisasi sebesar Rp. 8.148.827.865,-, sehingga efisiensi anggarannya menggunakan rumus adalah :

$$= 100\% - \left\{ \frac{\text{Jumlah Realisasi Anggaran}}{\text{Jumlah Alokasi Anggaran}} \right\} \times 100\%$$

$$= 100\% - \frac{8.148.827.865}{10.662.142.450} \times 100\%$$

$$= 100\% - 76,43\%$$

$$= 23,57\% \text{ Efisiensi Anggaran}$$

SASARAN STRATEGIS II

“MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT DPRD”

Sasaran strategis ini bukan merupakan indikator kinerja utama dengan indikator kinerja Nilai Sakip (n-1), capaian kinerja ini dari indikator kinerja tersebut disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.26
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2
Target Terhadap Realisasi
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Sakip (n-1)	Nilai	75	76,65	102,47
Rata-rata Capaian Kinerja			102,47		

Sumber : LHE Evaluasi Lakip Tahun 2023

Analisis capaian kinerja sasaran strategis **“Meningkatnya Akuntabilitas**

Kinerja Sekretariat DPRD' berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut :

**Indikator Kinerja
NILAI SAKIP (n-1)**

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Target kinerja dan realisasi kinerja Nilai SAKIP (n-1) Sekretariat DPRD pada Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.27

Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja
Nilai SAKIP Sekretariat DPRD
Pada Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai SAKIP (n-1)	Nilai	75	76,65	102,47

Hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja yaitu Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2023, Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur memperoleh nilai 76,65 dengan kategori BB, dengan rincian komponen penilaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.28

Komponen Penilaian Kinerja
Terhadap Dokumen LAKIP Sekretariat DPRD

OPD	Komponen Dinilai	Bobot	Nilai
Sekretariat DPRD	Perencanaan Kinerja	30.00	24.6
	Pengukuran Kinerja	30.00	20.40
	Pelaporan Kinerja	15.00	11.85
	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	20
Nilai Akuntabilitas Kinerja			76,85
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2023 dan beberapa tahun terakhir atau 5 Tahun berturut-turut (2019-2023)

Capaian Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur selama 5 (lima) Tahun (2019-2023), disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.29
 Nilai dan Kategori SAKIP
 Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur
 Tahun 2020-2023

Indikator	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Kategori	Capaian Kinerja
Nilai SAKIP	Nilai	2019	60.00	58.20	CC	97
		2020	60.00	58.25	CC	97.08
		2021	65.00	64.71	BB	99.55
		2022	75.00	71.10	BB	94.80
		2023	75.00	76.85	BB	102.47

Sumber : Renstra dan Lakip Sekretariat DPRD

3. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target RPJMD/Renstra (2021-2026)

Capaian Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur dibandingkan Target Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2021-2026/Renstra 2021-2026) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.30
Capaian Indikator Kinerja Strategis
Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur
Dibandingkan target RPJMD/Renstra 2021-2026

Sasaran Strategis	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD		
Indikator Kinerja	Target RPJMD/Renstra 2021-2026	Realisasi Tahun 2023	Presentase Capaian Kinerja
Nilai SAKIP	75	76.85	102.47

Sumber : Dokumen RPJMD, Renstra dan Lakip Sekretariat DPRD

Berdasarkan data pada Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Realisasi dan Capaian Kinerja belum mencapai atau melebihi target Kinerja yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD dan Renstra Sekretariat DPRD Kabuapten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Faktor-faktor yang perlu mendapat perhatian sesuai dengan rekomendasi perbaikan antara lain :

1. Dokumen Perencanaan Kinerja seharusnya menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai si setiap level jabatan, target kinerja kepala bidang disupport oleh target kinerja level dibawahnya sampai staf.
2. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai agar memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan tidak hanya menjadi tanggung jawab pada Kasubag. Perencanaan.

3. Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang, dari hasil pengukuran memberikan rekomendasi perbaikan.
4. Agar Sekretaris DPRD sebagai pengambil Keputusan (Decision Maker) terlibat langsung dalam mengukur capaian kinerja bawahannya dan pejabat dibawahnya melakukan hal yang sama kepada staf.
5. Pengukuran kinerja sebaiknya mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja.
6. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai agar memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja dan berkomitmen untuk meningkatkan kinerja.
7. Membuat Perkada tentang tunjangan kinerja dan mekanisme pembayaran Tukin yang kaitannya dengan capaian kinerja.
8. Membuat pedoman pola mutasi/rotasi (terdapat penjelasan mutasi dan rotasi didasarkan salah satunya karena pencapaian kinerjanya (BKPSDM).
9. Dokumen Laporan Kinerja menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya dengan narasi yang memadai.
10. Dokumen Laporan Kinerja menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmarking Kinerja)
11. Dokumen Laporan Kinerja menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan dengan rekomendasi perbaikan kinerja.
12. Mensosialisasikan informasi capaian kinerja dalam laporan kinerja sehingga seluruh pegawai berkomitmen untuk meningkatkan kinerja.
13. Informasi dalam laporan kinerja berkala digunakan dalam penyesuaian aktivitas dan penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.
14. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

4. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional/Capaian Daerah Lain

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja yang telah dicapai salah satunya dengan cara membandingkan realisasi kinerja yang telah dicapai dengan realisasi kinerja daerah/instansi lain. Perbandingan antara Tingkat capaian Sekretariat DPRD

Kabupaten Luwu Timur dengan daerah lain dalam pencapaian Indikator Strategis di Tahun 2023, Dimana Sekretariat DPRD Kabupaten/Provinsi Sulawesi Selatan **Belum ada.**

5. Analisa Penyebab keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang dilakukan

Pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja selama tahun 2023 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi sebagai bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan OPD

Dalam meningkatkan kualitas perencanaan di Sekretariat DPRD, keselarasan antara dokumen perencanaan harus tetap dijaga dan diperhatikan yaitu antara dokumen RPJMD, Renstra, Renja, RKA, DPA dan LAKIP.

2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan akuntabilitas kinerja pelayanan Sekretariat DPRD

3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Asset Perangkat Daerah

Pengelolaan asset perangkat daerah dipengaruhi oleh laporan pengelolaan asset yang disusun setiap bulannya.

4. Meningkatnya Kualitas Monitoring dan Pelaporan

Salah satu yang mempengaruhi peningkatan akuntabilitas kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur adalah melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur yang telah dilakukan.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Indikator kinerja ini di dukung oleh 1 Program, 10 Kegiatan dan 32 sub kegiatan, Dari

100% target kinerja yang ditetapkan terealisasi 91,15%. Adapun Program dan kegiatan yang mendukung yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 9. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 10. Layanan Administrasi DPRD

7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, maka dialokasikan anggaran sebesar Rp. 28.743.131.819 dari total anggaran yang dialokasikan di Sekretariat DPRD Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 26.020.481.889,71,-, sehingga efisiensi anggarannya menggunakan rumus adalah :

$$= 100\% - \left\{ \frac{\text{Jumlah Realisasi Anggaran}}{\text{Jumlah Alokasi Anggaran}} \right\} \times 100\%$$

$$= 100\% - \frac{26.020.481.889,71 \times 100\%}{28.743.131.819}$$

$$= 100\% - 90,53\%$$

$$= \mathbf{9,47\% \text{ Efisiensi Anggaran}}$$

a. Akuntabilitas Keuangan

Penyerapan anggaran belanja langsung sampai dengan TW IV tahun 2024 sebesar 83,77% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 50.591.755.255,-

Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut

Tabel 3.32
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja tahun 2024

NO		PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2024	
					(Rp.)	(%)
(1)		(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
						(6/5*100)
01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	28.743.131.819	28.743.131.819,00	26.020.481.889,71	90,53
	01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96.551.650	96.551.650,00	46.151.000	47,80
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	73.946.350	73.946.350	27.791.900	37,58
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.973.000	5.973.000	5.686.450	95,20
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5.073.300	5.073.300	4.493.900	88,58
	4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.559.000	11.559.000	8.178.750	70,76
	02	Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah	3.201.858.274	3.201.858.274	3.088.679.354	96,47

	5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.115.453.474	3.115.453.474	3.017.388.554	96,85
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	86.404.800	86.404.800	71.290.800	82,51
	03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	38.593.850	38.593.850,00	30.727.100	79,62
	7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	38.593.850	38.593.850	30.727.100	79,62
	04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	734.013.950	734.013.950,00	376.981.856	51,36
	8	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	261.780.000	261.780.000	208.830.000	79,77
	9	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	472.233.950	472.233.950	168.151.856	35,61
	05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.884.513.600	1.884.513.600,00	1.504.280.775	79,82
	10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.425.000	35.425.000	31.732.500	89,58
	11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	283.771.600	283.771.600	75.900.000	26,75
	12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.142.000	7.142.000	5.142.000	72,00
	13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.059.700	99.059.700	83.741.650	84,54
	14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	194.827.300	194.827.300	184.231.200	94,56
	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	247.900.000	247.900.000	235.400.000	94,96
	16	Fasilitas Kunjungan Tamu	261.992.000	261.992.000	187.237.200	71,47
	17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	754.396.000	754.396.000	700.896.225	92,91
	06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.521.851.000	2.521.851.000,00	2.066.874.307,61	81,96

	18	Pengadaan Mebel	535.750.000	535.750.000	427.900.000,00	79,87
	19	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.527.500.000	1.527.500.000	1.451.624.307,61	95,03
	20	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	458.601.000	458.601.000	187.350.000,00	40,85
	07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	873.139.100	873.139.100,00	747.920.175	85,66
	21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	55.099.100	55.099.100	49.747.500	90,29
	22	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	500.040.000	500.040.000	420.922.675	84,18
	23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	318.000.000	318.000.000	277.250.000	87,19
	08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	754.320.000	754.320.000,00	394.184.810,10	52,26
	24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	189.740.000	189.740.000	111.966.100	59,01
	25	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	139.580.000	139.580.000	44.790.000	32,09
	26	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	54.000.000	54.000.000	50.129.710,10	92,83
	27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	180.000.000	180.000.000	96.299.000	53,50
	28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	191.000.000	191.000.000	91.000.000	47,64
	09	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	17.463.090.395	17.463.090.395,00	16.727.343.212	95,79
	29	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	16.590.810.395	16.590.810.395	15.932.366.012	96,03

	30	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	662.280.000	662.280.000	660.880.000	99,79
	31	Pelaksanaan Medical Check-Up DPRD	210.000.000	210.000.000	134.097.200	63,86
	10	Layanan Administrasi DPRD	1.175.200.000	1.175.200.000,00	1.037.339.300	88,27
	32	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.175.200.000	1.175.200.000	1.037.339.300	88,27
02		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	21.848.623.436	21.848.623.436,00	16.361.246.975	74,88
	01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	3.598.397.286	3.598.397.286,00	2.869.835.077	79,75
	35	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	1.013.539.500	1.013.539.500	754.012.470	74,39
	36	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2.584.857.786	2.584.857.786	2.115.822.607	81,85
	02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	699.760.000	699.760.000,00	389.038.068	55,60
	37	Pembahasan KUA dan PPAS	27.770.750	27.770.750	26.156.980	94,19
	38	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	22.914.400	22.914.400	18.852.835	82,28
	39	Pembahasan APBD	421.810.200	421.810.200	193.537.205	45,88
	40	Pembahasan APBD Perubahan	120.185.500	120.185.500	65.500.563	54,50
	41	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	107.079.150	107.079.150	84.990.485	79,37

		03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	8.526.409.050	8.526.409.050,00	6.578.437.496	77,15
		42	Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	2.581.556.600	2.581.556.600	1.794.103.045	69,50
		43	Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Infrastruktur	2.797.791.950	2.797.791.950	2.286.407.279	81,72
		44	Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Perekonomian	2.668.110.600	2.668.110.600	2.024.368.874	75,87
		45	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	247.879.400	247.879.400	242.745.490	97,93
		46	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	231.070.500	231.070.500	230.812.808	99,89
		04	Peningkatan Kapasitas DPRD	2.189.120.000	2.189.120.000	1.185.375.230	54,15
		47	Pendalaman Tugas DPRD	1.757.588.500	1.757.588.500	911.091.850	51,84
		48	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	133.221.000	133.221.000	33.283.380	24,98
		49	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	294.000.000	294.000.000	238.000.000	80,95
		50	Penyusunan Program Kerja DPRD	4.310.500	4.310.500	3.000.000	69,60
		05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.388.107.400	1.388.107.400	1.150.351.501	82,87
		51	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	20.801.850	20.801.850	20.236.975	97,28

	52	Pelaksanaan Reses	1.367.305.550	1.367.305.550	1.130.114.526	82,65
	06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	47.866.000	47.866.000	31.000.800	64,77
	53	Pengawasan Kode Etik DPRD	47.866.000	47.866.000	31.000.800	64,77
	07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	1.445.300.000	1.445.300.000	1.396.061.500	96,59
	54	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	1.445.300.000	1.445.300.000	1.396.061.500,00	96,59
	08	Fasilitasi Tugas DPRD	3.953.663.700	3.953.663.700	2.761.147.303	69,84
	55	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3.905.995.200	3.905.995.200	2.724.156.303,00	69,74
	56	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	47.668.500	47.668.500	36.991.000,00	77,60
J U M L A H			50.591.755.255	50.591.755.255	42.381.728.864,71	83,77

Tabel 3.33
Belanja Daerah Sekretariat DPRD
Tahun Anggaran 2024

No	Belanja	Jumlah Anggaran	Realisasi	Persentase	Sisa	Persentase
1	2	3	4	5	6	7
	BELANJA	50.591.755.255	42.381.728.863,71	83,77	8.210.026.391	16,23
1	BELANJA OPERASI	47.786.332.655	40.238.954.556	84,21	7.547.378.099	15,79
	Belanja Pegawai	19.780.193.869	18.949.754.566	95,80	830.439.303	4,20
	Belanja Barang dan Jasa	28.006.138.786	21.289.199.990,10	76,02	6.716.938.796	23,98
2	BELANJA MODAL	2.805.422.600	2.142.774.308	76,38	662.648.292	23,62
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.277.922.600	691.150.000	54,08	586.772.600	45,92

	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.527.500.000	1.451.624.307,61	95,03	75.875.692	4,97
Total		50.591.755.255	42.381.728.863,71	83,77	8.210.026.391	16,23

Tabel 3.34
Realisasi Keuangan, Permasalahan/Kendala dan Solusi/Rekomendasi Perbaikan
Pada Urusan Sekretariat DPRD TW IV Tahun 2024

N O	PROGRAM/KEG IATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET TRIWULAN IV (BERDASARKAN ANGGARAN KAS)	REALISASI ANGGARAN S.D 31 DESEMBER 2024		TOTAL SISA ANGGARAN		PERMASALAHAN / KENDALA
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					(6/5*100)	(4 - 6)	(10/4*100)	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	28.743.131.819	28.743.131.819,00	26.020.481.889,71	90,53	2.860.510.629,29	9,95	
01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96.551.650	96.551.650,00	46.151.000	47,80	50.400.650,00	52,20	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	73.946.350	73.946.350	27.791.900	37,58	46.154.450,00	62,42	Pada Sub Kegiatan ini capaian realisasi sebesar 37,58 % dikarenakan masih terdapat rincian objek belanja yang tidak terealisasi terealisasi yaitu : Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 33.740.000 karena refocusing dan Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar 12.000.000 di karenakan Resign.
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.973.000	5.973.000	5.686.450	95,20	286.550,00	4,80	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5.073.300	5.073.300	4.493.900	88,58	579.400,00	11,42	

4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.559.000	11.559.000	8.178.750	70,76	3.380.250,00	29,24	Pada Sub Kegiatan ini capaian realisasi sebesar 70,76 % dikarenakan masih terdapat rincian objek belanja yang tidak terealisasi terealisasi yaitu : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp 1.273.250 dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp1.800.000
02	Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah	3.201.858.274	3.201.858.274	3.088.679.354	96,47	113.178.920,00	3,53	
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.115.453.474	3.115.453.474	3.017.388.554	96,85	98.064.920,00	3,15	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	86.404.800	86.404.800	71.290.800	82,51	15.114.000,00	17,49	Pada Sub Kegiatan ini capaian realisasi sebesar 82,51 % dikarenakan masih terdapat rincian objek belanja yang tidak terealisasi terealisasi yaitu : Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp2.200.000 (di karenakan Jadwal rapat yang dilaksanakan bertepatan dengan agenda lain) dan Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp12.000.000 di karenakan Resign.
03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	38.593.850	38.593.850,00	30.727.100	79,62	7.866.750,00	20,38	
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	38.593.850	38.593.850	30.727.100	79,62	7.866.750,00	20,38	Pada Sub Kegiatan ini capaian realisasi sebesar 79,62 % dikarenakan masih terdapat rincian objek belanja yang tidak terealisasi terealisasi yaitu : Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (pembantu pengurus barang) sebesar Rp5.050.000 (yang disediakan untuk 1 orang) dan Belanja Alat/Bahan untuk

								Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp1.425.750
04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	734.013.950	734.013.950,00	376.981.856	51,36	357.032.094,00	48,64	
8	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	261.780.000	261.780.000	208.830.000	79,77	52.950.000,00	20,23	Pada Sub Kegiatan ini capaian realisasi sebesar 79,77 % dikarenakan masih terdapat rincian objek belanja yang tidak terealisasi terealisasi yaitu : Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp5.950.000 (di karenakan Jadwal rapat yang dilaksanakan bertepatan dengan agenda lain) dan Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp47.000.000
9	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	472.233.950	472.233.950	168.151.856	35,61	304.082.094,00	64,39	Pada Sub Kegiatan ini capaian realisasi sebesar 35,61 % dikarenakan masih terdapat rincian objek belanja yang tidak terealisasi yaitu : Belanja Bimbingan Teknis sebesar Rp78.138.000 dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp225.944.094 (Efisiensi)
05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.884.513.600	1.884.513.600,00	1.504.280.775	79,82	380.232.825,00	20,18	
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.425.000	35.425.000	31.732.500	89,58	3.692.500,00	10,42	Pada Sub Kegiatan ini capaian realisasi sebesar 89,58 % . Sisa dari Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik sebesar Rp3.692.500

11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	283.771.600	283.771.600	75.900.000	26,75	207.871.600,00	73,25	Pada Sub Kegiatan ini capaian realisasi sebesar 26,75 % dikarenakan masih terdapat rincian objek belanja yang tidak terealisasi yaitu : Belanja Modal Personal Computer/Laptop sebesar 125.071.600 , Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya/Scanner,Printer & Harddisk Rp81.600.000 di karenakan refocusing
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.142.000	7.142.000	5.142.000	72,00	2.000.000,00	28,00	Sub kegiatan ini terealisasi sebesar 72,00% di karenakan adanya rincian objek belanja yang di sediakan dan tidak terealisasi Belanja Bahan-Isi Tabung Gas Rp2.000.000, yang disedian setiap bulannya 2 kali dan terealisasi 1 kali sebulan.
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.059.700	99.059.700	83.741.650	84,54	15.318.050,00	15,46	Sub kegiatan ini terealisasi sebesar 84,54% di karenakan adanya rincian objek belanja yang di sediakan dan tidak terealisasi yaitu : Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp8.783.850, (BBM operasional kendaraan dinas DP 18 G, DP 8081 G, Genset dan Mesin Babat) Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp2.240.000 dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp4.294.200
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	194.827.300	194.827.300	184.231.200	94,56	10.596.100,00	5,44	
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	247.900.000	247.900.000	235.400.000	94,96	12.500.000,00	5,04	
16	Fasilitas Kunjungan Tamu	261.992.000	261.992.000	187.237.200	71,47	74.754.800,00	28,53	

17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	754.396.000	754.396.000	700.896.225	92,91	53.499.775,00	7,09	
06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.521.851.000	2.521.851.000,00	2.066.874.307,61	81,96	454.976.692,39	18,04	
18	Pengadaan Mebel	535.750.000	535.750.000	427.900.000,00	79,87	107.850.000,00	20,13	Pada Sub Kegiatan ini masih terdapat rincian objek belanja yang belum terealisasi yaitu : Belanja Modal Meja Makan Pimpinan DPRD 3 Set Rp 81.000.000, (Rasionalisasi) dan sisa Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat Rp 26.850.000
19	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.527.500.000	1.527.500.000	1.451.624.307,61	95,03	75.875.692,39	4,97	
20	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	458.601.000	458.601.000	187.350.000,00	40,85	271.251.000,00	59,15	Sub kegiatan ini telah di laksanakan dan capaian realisasi 59,15% dan terdapat Rincian objek belanja yang mengalami refocusing yaitu : Belanja Modal Alat Pendingin Ac 1 PK , 2 PK dan 3 PK Rp87.935.000, Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)/ Waterheater, Springbed No.2 dan Vacuum Cleaner Rp150.101.000 dan Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film (video transmitter) Rp18.000.000 dan Belanja Modal Elektronik/Electric (Speaker Aktiv) 15.000.000
07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	873.139.100	873.139.100,00	747.920.175	85,66	125.218.925,00	14,34	
21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	55.099.100	55.099.100	49.747.500	90,29	5.351.600,00	9,71	Terkait sisa anggaran akan dilakukan penyesuaian harga di e-katalog pada penyusunan anggaran

								berikutnya
22	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	500.040.000	500.040.000	420.922.675	84,18	79.117.325,00	15,82	Pada Kegiatan ini realisasi keuangan hanya mencapai 84,18% karena Pada rek belanja air, listrik dan telepon tagihannya bersifat fariabel, tergantung beban pemakaian operasional kantor dan rujab
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	318.000.000	318.000.000	277.250.000	87,19	40.750.000,00	12,81	Pada Kegiatan ini realisasi keuangan hanya mencapai 87,19% karena Pada rek Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebesar Rp38.750.000 (Cleaning pada Rujab yang resign dan Belanja Jasa Tenaga Keamanan/Ajudan yang disediakan sebesar Rp2.000.000
08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	754.320.000	754.320.000,00	394.184.810,10	52,26	360.135.189,90	47,74	
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	189.740.000	189.740.000	111.966.100	59,01	77.773.900,00	40,99	target realisasi keuangan 100% terealisasi hanya 59,01 dikarenakan adanya kendaraan dinas yang rencananya akan melakukan perbaikan, akan tetapi padatnya kegiatan pimpinan sehingga kendaraan tersebut tidak sempat dilakukan perbaikan.
25	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	139.580.000	139.580.000	44.790.000	32,09	94.790.000,00	67,91	Capaian realisasi pada sub kegian ini masih 32,09% di karenakan belanja tersebut terealisasi sesuai dengan kebutuhan seperti : belanja Pemeliharaan Mesin Babat, belanja pemeliharaan genset, belanja Pemeliharaan Laptop, belanja Pemeliharaan Scanner, belanja Pemeliharaan Printer, belanja Pemeliharaan Televisi

								dan belanja Pemeliharaan AC yang ada di kantor dan 3 Rujab Pimpinan DPRD
26	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	54.000.000	54.000.000	50.129.710,10	92,83	3.870.289,90	7,17	
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	180.000.000	180.000.000	96.299.000	53,50	83.701.000,00	46,50	Capaian realisasi pada sub kegiatan ini masih 53,50% di karenakan belanja tersebut terealisasi sesuai dengan kebutuhan seperti : belanja Pemeliharaan Gedung kantor (Dinding dan Lantai), belanja pemeliharaan Pengecetan Pagar, Taman Kantor dan Gedung Kantor, belanja Pemeliharaan Instalasi air, wastafel, kamar mandi dan dapur, belanja Pemeliharaan Pintu dan Jendela Kantor, belanja Pemeliharaan Taman Kantor dan belanja Pengecetan Taman Kantor
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	191.000.000	191.000.000	91.000.000	47,64	100.000.000,00	52,36	Capaian realisasi pada sub kegiatan ini masih 47,64% di karenakan belanja tersebut terealisasi sesuai dengan kebutuhan seperti : Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II (Rujab ketua, rujab Waka I da Rujab Waka II) sebesar Rp49.000.000 dan Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi (jaringan Genset ke 3 rujab Pimpinan DPRD)

								Rp51.000.000
09	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	17.463.090.395	17.463.090.395,00	16.727.343.212	95,79	735.747.183,00	4,21	
29	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	16.590.810.395	16.590.810.395	15.932.366.012	96,03	658.444.383,00	3,97	
30	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	662.280.000	662.280.000	660.880.000	99,79	1.400.000,00	0,21	
31	Pelaksanaan Medical Check-Up DPRD	210.000.000	210.000.000	134.097.200	63,86	75.902.800,00	36,14	Capaian realisasi pada sub kegiat ini masih 63,86 % di karenakan dikarenakan masih padatnya kegiatan pimpinan dan anggota dewan
10	Layanan Administrasi DPRD	1.175.200.000	1.175.200.000,00	1.037.339.300	88,27	137.860.700,00	11,73	
32	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.175.200.000	1.175.200.000	1.037.339.300	88,27	137.860.700,00	11,73	Capaian realisasi pada sub kegiat ini masih 88,27 % terdapat Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp137.860.700
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	21.848.623.436	21.848.623.436,00	16.361.246.975	74,88	6.669.215.358,00	30,52	
01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	3.598.397.286	3.598.397.286,00	2.869.835.077	79,75	728.562.209,00	20,25	

35	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	1.013.539.500	1.013.539.500	754.012.470	74,39	259.527.030,00	25,61	Pada Sub Kegiatan ini capaian realisasi sebesar 74,39 % dikarenakan masih terdapat rincian objek belanja yang tidak terealisasi yaitu : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp1.318.316, Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp6.400.000, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp15.000.000, Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp17.500.000 Belanja Sewa Hotel Rp1.000.000 dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp218.038.014
36	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2.584.857.786	2.584.857.786	2.115.822.607	81,85	469.035.179,00	18,15	Pada Sub Kegiatan ini capaian realisasi sebesar 81,85 % dikarenakan masih terdapat rincian objek belanja yang tidak terealisasi terealisasi yaitu : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp2.334.285, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebesar Rp6.000.000, danBelanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp459.538.108
02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	699.760.000	699.760.000,00	389.038.068	55,60	310.721.932,00	44,40	
37	Pembahasan KUA dan PPAS	27.770.750	27.770.750	26.156.980	94,19	1.613.770,00	5,81	
38	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	22.914.400	22.914.400	18.852.835	82,28	4.061.565,00	17,72	Pada Sub Kegiatan ini capaian realisasi sebesar 82,28 % dikarenakan masih terdapat rincian objek belanja yang tidak terealisasi terealisasi yaitu : Belanja Perjalanan Dinas Biasa

								sebesar Rp3.560.000
39	Pembahasan APBD	421.810.200	421.810.200	193.537.205	45,88	228.272.995,00	54,12	Pada Sub Kegiatan ini capaian realisasi sebesar 45,88 % dikarenakan masih terdapat rincian objek belanja yang tidak terealisasi terealisasi yaitu : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp1.463.395, Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp47.250.000 dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp178.215.600
40	Pembahasan APBD Perubahan	120.185.500	120.185.500	65.500.563	54,50	54.684.937,00	45,50	Pada Sub Kegiatan ini capaian realisasi sebesar 54,50 % dikarenakan masih terdapat rincian objek belanja yang tidak terealisasi terealisasi yaitu : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp756.437 dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp53.110.000
41	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	107.079.150	107.079.150	84.990.485	79,37	22.088.665,00	20,63	Pada Sub Kegiatan ini capaian realisasi sebesar 79,37 % dikarenakan masih terdapat rincian objek belanja yang tidak terealisasi yaitu : Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp21.643.950
03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	8.526.409.050	8.526.409.050,00	6.578.437.496	77,15	1.947.971.554,00	22,85	

42	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	2.581.556.600	2.581.556.600	1.794.103.045	69,50	787.453.555,00	30,50	Pada Sub Kegiatan ini capaian realisasi sebesar 69,50 % dikarenakan masih terdapat rincian objek belanja yang tidak terealisasi yaitu : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover sebesar Rp1.040.600, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp12.000.000 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp57.090.000 dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp716.097.140
43	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	2.797.791.950	2.797.791.950	2.286.407.279	81,72	511.384.671,00	18,28	Pada Sub Kegiatan ini capaian realisasi sebesar 81,72 % dikarenakan masih terdapat rincian objek belanja yang tidak terealisasi yaitu : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp1.109.200, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover sebesar Rp1.145.140 , Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp15.000.000 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp2.527.500 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp44.470.000 dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp446.526.751

44	Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Perekonomian	2.668.110.600	2.668.110.600	2.024.368.874	75,87	643.741.726,00	24,13	Pada Sub Kegiatan ini capaian realisasi sebesar 75,87 % dikarenakan masih terdapat rincian objek belanja yang tidak terealisasi yaitu : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover sebesar Rp999.700 , Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp12.000.000 , Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp51.690.000 dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp577.050.431
45	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	247.879.400	247.879.400	242.745.490	97,93	5.133.910,00	2,07	
46	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	231.070.500	231.070.500	230.812.808	99,89	257.692,00	0,11	
04	Peningkatan Kapasitas DPRD	2.189.120.000	2.189.120.000	1.185.375.230	54,15	1.003.744.770,00	45,85	
47	Pendalaman Tugas DPRD	1.757.588.500	1.757.588.500	911.091.850	51,84	846.496.650,00	48,16	Pada Sub Kegiatan ini capaian realisasi sebesar 51,54 % dikarenakan masih terdapat rincian objek belanja yang tidak terealisasi yaitu : Belanja kursus Singkat/Pelatihan sebesar Rp 718.500.000, Belanja Bimbingan Teknis sebesar Rp27.100.000 , dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 100.462.650

48	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	133.221.000	133.221.000	33.283.380	24,98	99.937.620,00	75,02	Pada Sub Kegiatan ini capaian realisasi sebesar 24,98 % dikarenakan masih terdapat rincian objek belanja yang tidak terealisasi yaitu : Belanja makan dan minum rapat sebesar Rp 12.000.000, Belanja Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Pantia sebesar Rp 42.000.000 , Belanja Sewa Angkutan darat Bermotor Lainnya sebesar Rp 3.960.000, Belanja Sewa Hotel Sebesar Rp 18.600.000 dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 23.210.000,-
49	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	294.000.000	294.000.000	238.000.000	80,95	56.000.000,00	19,05	Pada Sub Kegiatan ini capaian realisasi sebesar 80,95 % dikarenakan masih terdapat rincian objek belanja yang tidak terealisasi yaitu : Belanja Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp 56.000.000 dikarenakan :
50	Penyusunan Program Kerja DPRD	4.310.500	4.310.500	3.000.000	69,60	1.310.500,00	30,40	Pada Sub Kegiatan ini capaian realisasi sebesar 69,60 % dikarenakan masih terdapat Sisa nego dari belanja Ecatalog
05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.388.107.400	1.388.107.400	1.150.351.501	82,87	237.755.899,00	17,13	
51	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	20.801.850	20.801.850	20.236.975	97,28	564.875,00	2,72	
52	Pelaksanaan Reses	1.367.305.550	1.367.305.550	1.130.114.526	82,65	237.191.024,00	17,35	Pada Sub Kegiatan ini capaian realisasi sebesar 82,65 % dikarenakan
06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	47.866.000	47.866.000	31.000.800	64,77	16.865.200,00	35,23	
53	Pengawasan Kode Etik DPRD	47.866.000	47.866.000	31.000.800	64,77	16.865.200,00	35,23	Dijelaskan
07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	1.445.300.000	1.445.300.000	1.396.061.500	96,59	49.238.500,00	3,41	

54	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	1.445.300.000	1.445.300.000	1.396.061.500,00	96,59	49.238.500,00	3,41	Pada Sub Kegiatan ini capaian realisasi sebesar 96,56 %masih terdapat sisa belanja dari rincian objek belanja seperti Belanja ATK sebesar Rp 1.450.000 (sisa Nego dari ecatalog),belanja cetak sebesar Rp 9.350.000 (belanja baliho), belanja Jas Iklan /Reklame, film dan Pemotretan sebesar Rp 32.000.000, dan belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 6.088.500,-
08	Fasilitasi Tugas DPRD	3.953.663.700	3.953.663.700	2.761.147.303	69,84	1.192.516.397,00	30,16	
55	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3.905.995.200	3.905.995.200	2.724.156.303,00	69,74	1.181.838.897,00	30,26	
56	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	47.668.500	47.668.500	36.991.000,00	77,60	10.677.500,00	22,40	
		50.591.755.255	50.591.755.255	42.381.728.864,71	83,77	8.210.026.390,29	16,23	

Tabel 3.35

Realisasi Capaian Kinerja dan Keuangan , Permasalahan/Kendala daSolusi/Rekomendasi
Perbaikan Pada Urusan Sekretariat DPRD TW IV Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PERMASALAHAN TERKAIT PENCAPAIAN KINERJA (SECARA TEKNIS BAIK FAKTOR INTERNAL MAUPUN FAKTOR EKSTERNAL)	PERMASALAHAN TERKAIT REALISASI KEUANGAN	SOLUSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1,0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indikator Capaian Kinerja : Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu target 2 Dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%	Jumlah Anggaran yang diminta pada TW 4 sebesar Rp. 73.946.350,- Realisasi Keuangan Rp 27.791.900 atau 37,56% dikarenakan masih terdapat rincian objek belanja yang tidak terealisasi terealisasi yaitu : Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp 33.740.000 Rasionalisasi kebutuhan anggaran dan Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar 12.000.000 di karenakan Resign.	Lebih Memaksimalkan PengaLokasikan Anggaran Sehingga Bisa Maksimal Dan Melakukan Koordinasi Yang Baik
		Indikator Capaian Kinerja : Jumlah Jasa Tenaga administrasi yang terbayarkan setiap bulannya, target 2 orang terealisasi 2 orang atau 100%		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indikator Capaian Kinerja : Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD (Dokumen) Target 2 Dokumen dan Terealisasi 2 Dok atau 100% (RKA Perubahan 2024 dan RKA 2025)	Jumlah Anggaran yang diminta pada TW 4 sebesar Rp. 5.973.000 ,- Realisasi Keuangan Rp 5.686.450,- atau 95,20%.	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Indikator Capaian Kinerja : Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD . Target di TW III 1 Dok dan Terealisasi 1 Dok atau 100% (RKA Perubahan 2024)	Jumlah Anggaran yang diminta pada TW 4 sebesar Rp. 5.073.300 ,- Realisasi Keuangan Rp 4.493.900,- atau 88,56%. masih terdapat Sisa nego dari belanja Ecatalog	Melakukan Reviw pada Tahun berikutnya
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator : Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu Target TW IV 2 Laporan dan Terealisasi 2 laporan atau 100 %	Jumlah anggara di TW IV Rp 11.559.000- terealisasi sebesar 8.178.750, atau 70,76%. dikarenakan masih terdapat rincian objek belanja yang tidak terealisasi terealisasi yaitu : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp 1.273.250 dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp1.800.000	Lebih Memaksimalkan PengaLokasikan Anggaran Sehingga Bisa Maksimal Dan Melakukan Koordinasi Yang Baik
2	Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indikator Capaian Kinerja : Jumlah Gaji Dan Tunjangan ASN Yang Terbayarkan Dengan target 23 Orang dan terealisasi 23 Orang atau 100%	Jumlah anggaran TW 4 Rp 3.115.453.474,- terealisasi sebesar Rp 3.017.388.554-, atau 96,85%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Indikator : Jumlah lapor keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dengan target di TW IV 3 Laporan dan terealisasi 3 Laporan atau 100%	Jumlah anggaran TW IV Rp 86.404.800,- terealisasi sebesar Rp 52.740.300-, atau 71.290.800. dikarenakan masih terdapat rincian objek belanja yang tidak terealisasi terealisasi yaitu : Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp2.200.000 (di karenakan Jadwal rapat yang dilaksanakan bertepatan dengan agenda lain) dan Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp12.000.000 di karenakan Resign.	Lebih Memaksimalkan PengaLokasikan Anggaran Sehingga Bisa Maksimal Dan Melakukan Koordinasi Yang Baik

3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun. Target di TW IV 1 dokumen terealisasi 1 dok atau 100%	Jumlah anggaran TW IV Rp 38.593.850,- terealisasi sebesar Rp 30.727.100,- 71,85 %. Pada Sub Kegiatan ini capaian realisasi sebesar 79,62 % dikarenakan masih terdapat rincian objek belanja yang tidak terealisasi terealisasi yaitu : Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (pembantu pengurus barang) sebesar Rp5.050.000 (yang disediakan untuk 1 orang) dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp1.425.750	Lebih Memaksimalkan Pengalokasian Anggaran Sehingga Bisa Maksimal Dan Melakukan Koordinasi Yang Baik Ke Stakeholder Terkait
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan Data Administrasi Kepegawaian Yang Dimutahirkan Target TW III 1 dok. Realisasi 1 dok atau 100%	Jumlah anggaran TW 3 Rp 241.820.000,- terealisasi sebesar Rp 154.850.000,- atau 64,04%.	Mengoptimalkan waktu dan anggaran yang ada agar ditahun 2024 realisasi anggaran bisa tercapai 100%.
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknis Target 20 Orang dan Terealisasi 16 Orang atau 80%. Hal ini disebabkan Kgiatan ini sifatnya disediakan berdasarkan undangan untuk mengikuti bimtek.	Jumlah anggaran TW 4 Rp 210.000.000,- terealisasi sebesar Rp100.795.570,- atau 48,00%. Kgiatan ini sifatnya disediakan berdasarkan undangan untuk mengikuti bimtek.	Lebih selektif Pengalokasian Anggaran Sehingga Bisa Maksimal
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 9 paket dan terealisasi 9 paket atau 100%.	Jumlah anggaran TW 4 Rp 35.425.000,- terealisasi sebesar Rp 31.732.500,- atau 89,58%. Realisasi anggaran tidak mencapai 100% yang telah di karenakan sub kegiatan ini terealisasi sesuai dengan kebutuhan untuk Gedung kantor dan 3 Rujab Pimpinan DPRD Target Dilaksanakan Berdasarkan Kebutuhan PerbaikanKomponen InstalasiListrik Yang Rusak	Lebih Memaksimalkan Pengalokasian Anggaran Sehingga Bisa Maksimal Dan Melakukan Koordinasi Yang Baik Ke Stakeholder Terkait
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan kantor Yang Disediakan Target 5 Paket dan Terealisasi 2 Paket atau 40%. dikarenakan adanya Rasionalisasi pada beberapa target sehingga tidak mencapai target realisasi kinerja	Jumlah anggaran TW 4 Rp 283.771.600,- terealisasi Rp 75.900.000,- atau 26,75%. Pada Sub Kegiatan ini capaian realisasi sebesar 26,75 % dikarenakan masih terdapat rincian objek belanja yang tidak terealisasi yaitu : Belanja Modal Personal Computer/Laptop sebesar 125.071.600 , Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya/Scanner,Printer & Harddisk Rp81.600.000 di karenakan rasionalisasi.	Lebih selektif Pengalokasian Anggaran Sehingga Bisa Maksimal
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan. Target IV 2 Jenis terealisasi 2 Jenis atau 100%	Jumlah anggaran TW IV Rp 7.142.000,- terealisasi sebesar Rp5.142.000,- atau 68,72%. di karenakan adanya rincian objek belanja yang di sediakan dan tidak terealisasi Belanja Bahan-Isi Tabung Gas Rp2.000.000, yang disedian setiap bulannya 2 kali dan terealisasi 1 kali sebulan.	Lebih selektif Pengalokasian Anggaran Sehingga Bisa Maksimal

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Yang Disediakan . Target 6 jenis realisasi 6 jenis atau 100%.	Jumlah anggaran TW 3 Rp 99.059.700,- terealisasi sebesar Rp 83.741.650,- atau 84,54%. (Sub kegiatan ini terealisasi sebesar 84,54% di karenakan adanya rincian objek belanja yang di sediakan dan tidak terealisasi yaitu : Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp8.783.850, (BBM operasinal kendaraan dinas DP 18 G, DP 8081 G, Genset dan Mesin Babat) Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp2.240.000 dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp4.294.200	Lebih selektif Pengalokasian Anggaran Sehingga Bisa Maksimal
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan. Target 3 Paket terealisasi 3 Paket atau 100%.	Jumlah anggaran TW 4 Rp 194.827.300,- terealisasi sebesar Rp 184.231.200,- atau 94,56%. Capaian Realisasi Realisasi anggaran tidak mencapai 100% dikarenakan masih adanya ptj yang terealisasi d TW IV	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan. Target IV Laporan te realisasi 3 Laporan atau 100%	Jumlah anggaran TW 4 Rp 247.900.000,- terealisasi sebesar Rp 235.400.000,- atau 94,96%.	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu. Target IV 4 Laporan dan terealisasi 3 Laporan atau 100%	Jumlah anggaran TW 4 Rp 261.992.000,- terealisasi sebesar Rp 187.237.200,- atau 71,47%. Terdapat sisa belanja Makan Minum Tamu Hari Besar Keagamaan dan Realisasi kinerja tidak bisa diprediksi karena sifatnya Disediakan untuk Tamu-Tamu Pemerintah Daerah.	Lebih selektif Pengalokasian Anggaran Sehingga Bisa Maksimal
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi Dan Konsultasi SKPD . 110 laporan dan terealisasi sampai dengan tw III 56 Laporan atau 50,91%	Jumlah anggaran TW 4 Rp 754.396.000,- terealisasi sebesar Rp 700.896.225,- atau 92,91%.	
06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mabel yang Diadakan. Target 10 unit terealisasi 7 unit atau 90%. Ada 3 target yang tidak terealisasi dikarenakan adanya Rasionalisasi.	Jumlah anggaran TW 4 Rp535750.000,- terealisasi sebesar Rp427.900.000,- atau 79,87%. (Pada Sub Kegiatan ini masih terdapat rincian objek belanja yang belum terealisasi yaitu : Belanja Modal Meja Makan Pimpinan DPRD 3 Set Rp 81.000.000, (Rasionalisasi) dan sisa Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat Rp 26.850.000	Lebih selektif Pengalokasian Anggaran Sehingga Bisa Maksimal
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan. Target 3 Unit terealisasi 3. atau 100%	Jumlah anggaran TW IV Rp1.527.500.000,- terealisasi sebesar Rp 1.451.624.307,61,- atau 95,03%	

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Gedung kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan. Target 8 Unit terealisasi 3 unit atau 37,50%. Di karenakan Adanya Efisiensi	Jumlah anggaran TW 4 Rp 458.601.000,- terealisasi sebesar Rp 187.350.000,- capaian realisasi 59,15% dan terdapat Rincian objek belanja yang mengalami refocusing yaitu : Belanja Modal Alat Pendingin Ac 1 PK , 2 PK dan 3 PK Rp87.935.000, Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)/ Waterheater, Springbed No.2 dan Vacum Cleanner Rp150.101.000 dan Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film (video transmitter) Rp18.000.000 dan Belanja Modal Elektronik/Electric (Speaker Aktiv) 15.000.000	Lebih selektif Pengalokasian Anggaran Sehingga Bisa Maksimal
07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Target TW IV 3 Laporan dan Terealisasi 3 Laporan atau 100 %	Jumlah anggaran TW 4 Rp 55.099.100,- terealisasi sebesar Rp 49.747.500,- atau 90,29 %. Terdapat rincian objek Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos yang terealisasi di TW III	Terkait sisa anggaran akan dilakukan penyesuaian harga di e-katalog pada penyusunan anggaran berikutnya
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening bulanan telepon, air dan listrik kantor yang terbayarkan. Target 36 Laporan dan terealisasi 36 Laporan atau 100%	Jumlah anggaran TW 4 Rp 500.040.000- terealisasi sebesar Rp 420.922.675- atau 84,18%. untuk sub kegiatan ini bersifat disediakan karena sifatnya variabel	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan Yang Terbayarkan. Target 21 Laporan dan terealisasi 18 Laporan atau 85,71%. Karena Cleaning pada Rujab yang mengundurkan diri dan Belanja Jasa Tenaga Keamanan/Ajudan yang disediakan	Jumlah anggaran TW IV Rp 318.000.000. ,- terealisasi sebesar Rp277.250.000,- atau 87,19%. Pada Kegiatan ini realisasi keuangan hanya mencapai 87,19% karena Pada rek Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebesar Rp38.750.000 (Cleaning pada Rujab yang resign dan Belanja Jasa Tenaga Keamanan/Ajudan yang disediakan sebesar Rp2.000.000	Akan dilakukan penyesuaian target kedepan sesuai Jumlah jasa pelayanan umum
08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya. Target 11 Unit dan terealisasi 11 Unit atau 100%	Jumlah anggaran TW IV Rp 189.740.000 terealisasi sebesar Rp 111.966.100- atau 59,01 %. Disesuaikan dengan Jumlah kendaraan Tersedia yang mendapat pemeliharaan	Lebih selektif Pengalokasian Anggaran Sehingga Bisa Maksimal
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara. Target 190 unit dan terealisasi 79 Unit atau 41,58%. Di Rasionalisasikan	Jumlah anggaran TW IV Rp 139.580.000- terealisasi sebesar Rp44.790.000,- atau 32,09%. di karenakan belanja tersebut terealisasi sesuai dengan kebutuhan seperti : belanja Pemeliharaan Mesin Babat, belanja pemeliharaan genset, belanja Pemeliharaan Laptop, belanja Pemeliharaan Scanner, belanja Pemeliharaan Printer, belanja Pemeliharaan Televisi dan belanja Pemeliharaan AC yang ada di kantor dan 3 Rujab Pimpinan DPRD (Rasionalisasi	Menetapkan Target yang spesifik, terukur, dan realistis untuk memperbaiki kinerja. Tujuan ini harus dapat diukur dan memiliki batas waktu yang jelas.

	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Barang Milik daerah Yang Diasuransikan. Target 6 Unit dan Terealisasi 6 Unit atau 100%	Jumlah anggaran TW IV Rp 54.000.000-teralisasi sebesar Rp 50.129.710,10,- atau 92,83%.	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara /Direhabilitasi. Target 3 Unit realisasi 3 Unit atau 100%	Jumlah anggaran TW IV Rp 180.000.000-teralisasi sebesar Rp96.299.000,- atau 53,50%. di karenakan belanja tersebut terealisasi sesuai dengan kebutuhan seperti : belanja Pemeliharaan Gedung kantor (Dinding dan Lantai), belanja pemeliharaan Pengecatan Pagar, Taman Kantor dan Gedung Kantor, belanja Pemeliharaan Instalasi air, wastafel, kamar mandi dan dapur, belanja Pemeliharaan Pintu dan Jendela Kantor, belanja Pemeliharaan Taman Kantor dan belanja Pengecatan Taman Kantor	Lebih selektif Pengalokasian Anggaran Sehingga Bisa Maksimal
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Saran dan Prasarana Gedung kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara /Direhabilitasi. Target 3 Unit. Dan Terealisasi 1 Unit atau 33,33%	Jumlah anggaran TW IV Rp 191.000.000,-teralisasi sebesar Rp 91.000.000 atau 47,64%,- di karenakan belanja tersebut terealisasi sesuai dengan kebutuhan seperti : Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II (Rujab ketua, rujab Waka I dan Rujab Waka II) sebesar Rp49.000.000 dan Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi (jaringan Genset ke 3 rujab Pimpinan DPRD) Rp51.000.000 (Sifatnya di Sediakan)	Lebih selektif Pengalokasian Anggaran Sehingga Bisa Maksimal
09	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Indikator Capaian Kinerja :Jumlah Bulanan gaji Dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota DPRD Yang Terbayarkan 35 Orang Terealisasi 35 Orang atau 100%	Jumlah anggaran Rp 16.590.810.395,-teralisasi sebesar Rp 15.932.366.012,- atau 96,88%.	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya Yang Diadakan. Target 35 Stel, terealisasi 35 Stel atau 100%	Jumlah anggaran Rp 662.280.000 ,- dan Terealisasi sebesar Rp 660.880.000 atau 99,79%	
	Pelaksanaan Medical Check-Up DPRD	Jumlah Pimpinan Dan Anggota DPRD Yang Melakukan Medical Chek-UP Target 35 Orang Realisasi 21 Orang atau 62,86% dikarena Jadwal MCU bersamaan dgn kegiatan lain.	Jumlah anggaran Tw IVRp 210.000.000,-teralisasi sebesar 134.097.200 atau 63,83%. dikarena Jadwal MCU bersamaan dgn kegiatan lain.	Akan dilakukan Penjadwalan ulang MCU d
10	Layanan Administrasi DPRD			
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Indikator Capaian Kinerja : Jumlah Bahan /Perlengkapan Ruimahnya Yang Disediakan Target 3 Jenis Terealisasi 3 Jenis atau 100%	Jumlah anggaran TW IV Rp 1.175.200.000,-teralisasi sebesar Rp 1.037.339.300 atau 88,27 %.	

11	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD			
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Indikator Capaian Kinerja : Jumlah kajian perundang-undangan yang diselenggarakan Target 13 Dokumen dan Terealisasi sampai dengan TW IV sebanyak 12 Ranperda atau 80%	Jumlah anggaran TW IV Rp .101.353.950-terrealisasi sebesar Rp 754.012.470 atau 74,39 %.	Lebih selektif Pengalokasian Anggaran Sehingga Bisa Maksimal
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Indikator Capaian Kinerja : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. Target di TW 4 Dokumen dan dan Terealisasi 12 Dokumen atau 80%	Jumlah anggaran TW IV Rp 2.584.857.786-terrealisasi sebesar Rp 2.115.822.607 atau 81,85 %.	Meskipun Ranperda yang belum ditetapkan merupakan hal yang tidak dapat dihindari namun tetap perlu koordinasi akan dengan Pimpinan DPRD agar kedepan lebih maksimal dengan tetap mempedomani prosedur dan Waktu yang telah ditetapkan untuk pembahasan suatu ranperda.
12	Pembahasan Kebijakan Anggaran			
	Pembahasan KUA dan PPAS	Indikator Capaian Kinerja : Jumlah Dokumen hasil pembahasan Target TW 2 Dokumen Terealisasi 2 Dokumen atau 100%	Jumlah anggaran Rp 27.770.750,-terrealisasi sebesar Rp 26.156.980 atau 94 %.	untuk belanja Perjalanan dinas yang tidak mencapai target kinerja keuangan akan dilakukan evaluasi.
	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Indikator Capaian Kinerja : Jumlah Dokumen hasil pembahasan Target TW 2 Dokumen Terealisasi 2 Dokumen atau 100%	Jumlah anggaran Rp 22.914.400,-terrealisasi sebesar Rp 18.852.835 atau 82 %.	untuk belanja makan dan minum rapat, belanja perjalanan dinas yang tidak mencapai target kinerja keuangan akan dilakukan evaluasi.
	Pembahasan APBD	Indikator Capaian Kinerja : Jumlah Dokumen hasil pembahasan Target TW 1 Dokumen Terealisasi 1 Dokumen atau 100%	Jumlah anggaran Rp 421.810.200,-terrealisasi sebesar Rp 193.537.205 atau 45 %.	untuk belanja Perjalanan dinas yang tidak mencapai target kinerja keuangan akan dilakukan evaluasi.
	Pembahasan APBD Perubahan	Indikator Capaian Kinerja : Jumlah Dokumen hasil pembahasan Target TW 1 Dokumen Terealisasi 1 Dokumen atau 100%	Jumlah anggaran Rp 120.185.500,-terrealisasi sebesar Rp 65.500.563 atau 54 %.	untuk belanja Perjalanan dinas yang tidak mencapai target kinerja keuangan akan dilakukan evaluasi.
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Indikator Capaian Kinerja : Jumlah Dokumen hasil pembahasan Target TW 1 Dokumen Terealisasi 1 Dokumen atau 100%	Jumlah anggaran Rp 107.079.150,-terrealisasi sebesar Rp 84.990.485 atau 79 %.	untuk belanja Perjalanan dinas yang tidak mencapai target kinerja keuangan akan dilakukan evaluasi.
13	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			

	Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Indikator capaian kinerja : Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan Dan Hukum Target TW 4 dokumen dan Terealisasi 4 Dok atau 100,00%, dimana didalam dokumen terdapat Yaitu : Surat Undangan Dengar Pendapat, Notulen, Daftar Hadir, Foto	Jumlah anggaran TW IV Rp 2.581.556.600 ,- terealisasi sebesar Rp 1.714.974.183,- atau 66,43%	untuk belanja yang belum teralisasi akan dilakukan evaluasi kinerja dan evaluasi
	Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Infrastruktur	Indikator capaian kinerja : Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Infrastruktur Target TW 4 dokumen dan Terealisasi 4 Dok atau 100,00%, dimana didalam dokumen terdapat Yaitu : Surat Undangan Dengar Pendapat, Notulen, Daftar Hadir, Foto	Jumlah anggaran TW IV Rp 2.797.791.950,- terealisasi sebesar Rp 2.116.161.849,- atau 75,63 %.	untuk belanja yang belum teralisasi akan dilakukan evaluasi kinerja dan evaluasi realisasi keuangan pada TW IV
	Pengawasan Urusan Pemeritahan Bidang Perekonomian	Indikator capaian kinerja : Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Perekonomian Target TW 4 dokumen dan Terealisasi 4 Dok atau 100,00%, dimana didalam dokumen terdapat Yaitu : Surat Undangan Dengar Pendapat, Notulen, Daftar Hadir, Foto	Jumlah anggaran TW IV Rp 2.668.110.600,- terealisasi sebesar Rp 1.631.600.709,- atau 61,15 %.	untuk belanja yang belum teralisasi akan dilakukan evaluasi kinerja dan evaluasi realisasi keuangan pada TW IV
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Indikator capaian kinerja : Jumlah Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh BPK Target TW II 1 Dokumen dan Terealisasi 1 Dokumen dimana didalam Rekomendasi terdapat Yaitu : Catatan dan Rekomendasi, Laporan Pansus dan Sk Pansus	Jumlah anggaran TW IV Rp 247.879.400,- terealisasi sebesar Rp 242.754.490,- atau 97,9%.	Sisa Anggaran Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah akan di geser ke sub kegiatan yang membutuhkan anggaran
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Indikator capaian kinerja : Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Kepala Dearah Target TW I 1 dokumen	Jumlah anggaran TW IV Rp 231.070.500,- terealisasi sebesar Rp 230.812.808,- atau 99,8%.	Sisa Anggaran Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah akan di geser ke sub kegiatan yang membutuhkan anggaran
14	Peningkatan Kapasitas DPRD			
	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Bimtek yang Diikuti Oleh Pimpinan Dan Anggota DPRD dengan target 3 kali realisasi 2 kali atau 66,6%. Untuk TW III tidak di targetkan karena masa transisi oleh Anggota Periode 2019-2024 ke periode 2024-2029	Jumlah anggaran TW III Rp 1.054.127,33- terealisasi sebesar Rp412.702.650 ,- atau 39,15%.	Sisa anggaran yang tersedia akan dioptimalkan atau direalisasikan pada TW III dan TW IV
	Penyediaan Kelompok Pakar Dan Tim Ahli	Jumlah Tim Pakar Dan Tim Ahli Yang disediakan target : 2 orang dan terealisasi 2 orang atau 100% (Disediakan sesuai dengan kebutuhan dari alat Kelengkapan)	Jumlah anggaran TW III Rp 113.770.000,- terealisasi sebesar Rp 30.000.000,- atau 26,37%.	Sisa anggaran yang tersedia akan dioptimalkan atau direalisasikan pada TW III dan TW IV
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tim Ahli Fraksi. Target 6 Orang Realisasi 6 orang atau 100% (Sesuai dengan fraksi di DPRD)	Jumlah anggaran TW III Rp 189.000.000,- terealisasi sebesar Rp 168.000.000,-	untuk belanja yang belum teralisasi akan dilakukan evaluasi kinerja dan evaluasi realisasi keuangan pada TW IV

	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD Target 1 Dok dan Terealisasi 1 Dok atau 100%	Jumlah anggaran TW III Rp 4.310.500,- terealisasi sebesar Rp 3.000.000, Berdasarkan hasil rapat bersama pimpinan, untuk penetapan renja akan dilaksanakan pada saat alat kelengkapan terbentuk	untuk belanja yang belum teralisasi akan dilakukan evaluasi kinerja dan evaluasi realisasi keuangan pada TW II
15	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Indikator capaian kinerja : Jumlah Dokumen pada sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Target 3 dokumen Terealisasi 3 Dokumen atau 100%	Jumlah anggaran TW IV Rp 20.801.850,- terealisasi sebesar Rp 20.236.975,- atau 97,2%.	
	Pelaksanaan Reses	Indikator capaian kinerja :Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses target 95 Dokumen dan Terealisasi 30 dok. atau 31,58%, di tw I . karena sub kegiatan tersebut dilaksanakan pada TW I dan TW IV	Jumlah anggaran TW IV Rp 1.367.305.550,- terealisasi sebesar Rp1.130.114.526,- atau 82,65%. karena sub kegiatan tersebut dilaksanakan pada TW I dan TW IV	untuk belanja yang belum teralisasi akan dilakukan evaluasi kinerja dan evaluasi
16	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Pengawasan Kode Etik DPRD. Target 3 kali terealisasi 2 kali	Jumlah anggaran TW IV Rp 47.866.000,- terealisasi sebesar Rp 31.000.800 Atau 64,76%	untuk belanja yang belum teralisasi akan dilakukan evaluasi kinerja dan evaluasi
17	Pembahasan Kerja Sama Daerah			
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Kerjasama 27 dan terealisasi 27 atau 100%	Jumlah anggaran TW II Rp 716.890.000,- terealisasi sebesar Rp 544.175.000,- Atau 75,91%	Sisa anggaran yang tersedia akan dioptimalkan atau direalisasikan pada TW IV
18	Fasilitasi Tugas DPRD			
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah koordinasi Dan Konsultasi Pimpinan Dan Anggota DPRD Yang Dilaksanakan sebanyak 70 kali	Jumlah anggaran TW II Rp 2.250.390.200,- terealisasi sebesar Rp 1.567.156.275,- Atau 69,64%	Sisa anggaran yang tersedia akan dioptimalkan atau direalisasikan pada TW IV
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Pelaksanaan Tugas Bamus Yang difasilitasi. Target 12 Dok terealisasi 18 Dok. Melebihi Target yang telah di tentukan karena adanya perubahan jadwal yang di tetapkan pada rapat bamus sebelumnya dalam rangkapercepatan pembahasan APBD Perubahan oleh anggota DPRD 2019-2024	Jumlah anggaran TW IVRp 35.751.375,- terealisasi sebesar Rp 24.302.500,- atau 67,98 %. (Perubahan Jadwal akan berimplikasi dengan jumlah rapat yang akan dilaksanakan.	Sisa anggaran yang tersedia akan dioptimalkan atau direalisasikan padaTW IV

BAB 4

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja TW IV Tahun 2024 Sekretariat DPRD Luwu Timur sebagai bentuk pertanggungjawaban dan umpan balik perbaikan kinerja atas program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan di tahun mendatang serta dalam rangka mewujudkan *Good Governance*.

Berdasarkan hasil analisa kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur, bahwa capaian indikator utama sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target tahun 2024
1.	Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Lebih Baik	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda	100%
		Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	100%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Niali SAKIP	80

Capaian Indikator Kinerja Utama

Rata-rata nilai capaian indikator dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama, yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Sekretariat DPRD.

No.	Sasaran	Indikator Klnerja	Target	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian	Keterangan
1.	Meningkatnya Pelayanan Kinerja Kesekretariatan Dalam Mendukung Fungsi Legislasi, Fungsi	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang di tetapkan menjadi Perda	100%	100%	69,23%	69,23%	Sedang

	Pengawasan , Dan Fungsi Anggaran Dalam Menciptakan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Lebih Baik	Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	100	100%	100%	100%	Sangat Memuaskan
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Niali SAKIP	80.00	Belum dapat diukur karena nilai realisasinya baru akan bisa didapatkan setelah mendapatkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE)			

Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur dapat dikatakan telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya, peningkatan capaian kinerja utama di TW IV tahun 2024 sebesar 100% dari tahun sebelumnya.

Penyerapan anggaran belanja langsung dalam mendukung pencapaian kinerja sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 50.591.755.255,- terealisasi sebesar Rp. **42.381.728.864.,71,-** atau persentase capaian sebesar 83,77%.

3.2 Langkah Perbaikan Kinerja

1. Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi dari masing-masing bidang terkait.
2. Melakukan rapat koordinasi antara Sekretariat DPRD, Anggota DPRD dengan *stakeholder*)
3. Melaksanakan rapat koordinasi staf pertriwulan lingkup Sekretariat DPRD untuk peningkatan akuntabilitas kinerja.
4. Meningkatkan komitmen terhadap pencapaian target yang ditetapkan di setiap Bidang teknis pada lingkup Sekretariat DPRD.

3.3 Saran

Dalam mempertahankan dan memperbaiki keberhasilan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur, diharapkan :

1. Dukungan sumber daya manusia dalam meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keahlian ASN Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan

fungsi masing-masing dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan reformasi birokrasi lebih nyata perubahannya.

2. Dukungan kerjasama dan kolaborasi dari seluruh ASN Sekretariat DPRD.
3. Mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan capaian kinerja yang dianggap masih rendah.
4. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Peningkatan penyampaian informasi satu data.

3.4 Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Perbaikan-Perbaikan Tahun Lalu

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Kinerja TW pada Tahun 2023 di tuangkan dalam matriks tindak lanjut sebagai berikut :

Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja TW IV Sekretariat DPRD Tahun 2024

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Agar melakukan koordinasi dengan OPD yang menangani Perencanaan agar mengkoordinir penyusunan Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja, pedoman Teknis Pengukuran Kinerja, SOP Pengumpulan Data Kinerja agar seragam di setiap OPD	Telah Melakukan kordinasi secara lisan dengan Bapelidbangda terkait dengan penyusunan pedoman teknis perencanaan kinerja, pedoman teknis pengukuran kinerja dan sop pengumpulan data kinerja. Dan Bapelitbangda akan mengakomodir penyusunan pedoman tersebut dengan melakukan pertemuan untuk semua OPD
2.	Melakukan perbaikan pada dokumen perencanaan, penetapan target kinerja pertriwulan dan dipublikasikan tepat waktu	Dokumen Perencanaan akan dipublikasikan tepat waktu
3.	Pimpinan harus terlibat dalam pengukuran kinerja sebagai pengambil keputusan. Agar pengukuran kinerja dapat efektif dan efisien maka tetapkan target per triwulan. Dasari hasil pengukuran kinerja untuk penyesuaian strategi, aktivitas dan penggunaan anggaran serta pemberian reward dan punishment	Melakukan review bersama pimpinan pengukuran kinerja sebagai pengambil keputusan agar pengukuran kinerja dapat efektif dan efisiensi
4.	Formalkan dan publikasikan pelaporan	Dokumen Perencanaan akan dipublikasikan

	kinerja tepat waktu. Pada laporan kinerja berikan analisis yang memadai pada setiap perbandingan realisasi kinerja yang disajikan. Libatkan seluruh pegawai dalam penyusunan laporan kinerja sehingga seluruh pegawai peduli pada informasi yang ada di dalam laporan kinerja dan gunakan informasi dalam laporan kinerja sebagai bahan untuk penyesuaian strategi, aktivitas dan penggunaan anggaran	tepat waktu
5.	Lakukan perbaikan pelaksanaan evaluasi internal. Tingkatkan SDM yang melakukan evaluasi sehingga evaluasi dapat dilaksanakan secara mendalam dan pada akhirnya dapat meningkatkan implementasi SAKIP OPD	Akan dilakukan internal secara berjenjang sampai level terendah dilakukan dengan hasil SKP individu dan Evaluasi internal dengan menggunakan aplikasi Sipengendali dan aplikasi E-Sakip Luwu Timur



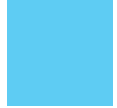


LAMPIRAN







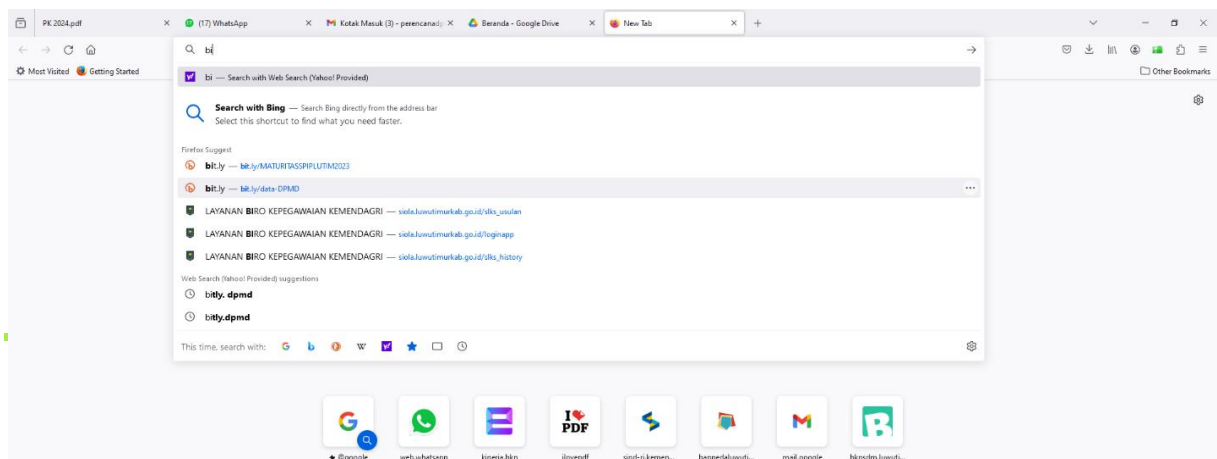


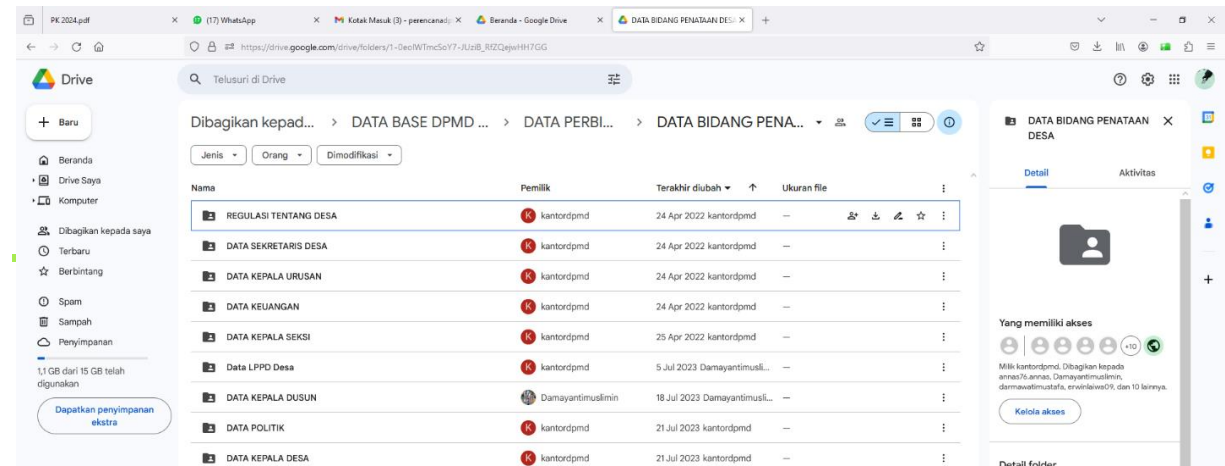
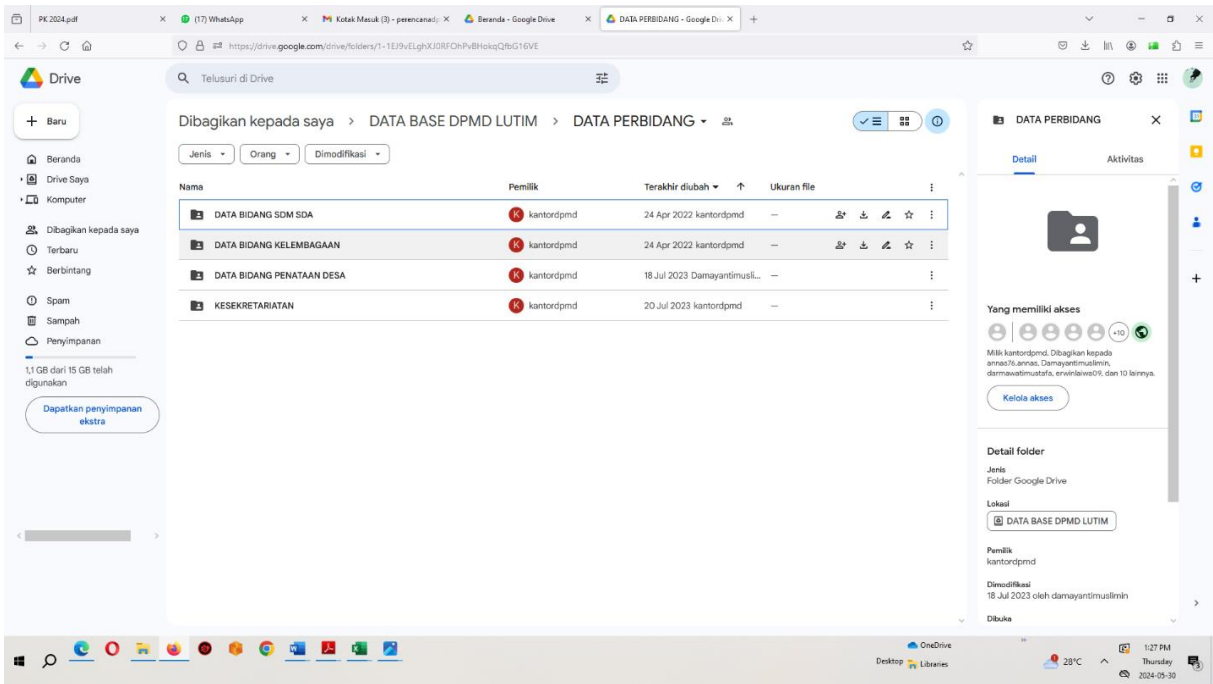
AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

MENGGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI

<https://bit.ly/data-DPMD>





PK 2024.pdf (17) WhatsApp Kotak Masuk (3) - perencanaan Beranda - Google Drive DATA BIDANG KELEMBAGAAN

https://drive.google.com/drive/folders/1spvDkDS0i1r5CV9f1g5ykeYGC2X0p2

Telusuri di Drive

Dibagikan kepada... > DATA BASE DPMD ... > DATA PERBI... > DATA BIDANG KELE...

Jenis Orang Dimodifikasi

Nama	Pemilik	Terakhir diubah	Ukuran file
DATA BPD	kantordpmd	24 Apr 2022 kantordpmd	—
DATA POSYANDU	kantordpmd	24 Apr 2022 kantordpmd	—
DATA PKK	kantordpmd	24 Apr 2022 kantordpmd	—
DATA ORGANISASI KEMASYARAKATAN	kantordpmd	24 Apr 2022 kantordpmd	—
DATA RT	kantordpmd	21 Jul 2023 kantordpmd	—
DATA DASAWISMA	hikmaramadani7@gmail...	22 Sep 2023 hikmaramadan...	—

1,1 GB dari 15 GB telah digunakan

Dapatkan penyimpanan ekstra

DATA BIDANG KELEMBAGAAN

Detail Aktivitas

Yang memiliki akses

Miliki kantordpmd. Dibagikan kepada anas76.annas, DamayantiMuslimin, darmawatiMustafa, erwinlawa09, dan 10 lainnya.

Kelola akses

Detail folder

Jenis Folder Google Drive

Lokasi DATA PERBIDANG

Pemilik kantordpmd

Dimodifikasi 24 Apr 2022 oleh kantordpmd

1:27 PM Thursday 2024-05-30

PK 2024.pdf (17) WhatsApp Kotak Masuk (3) - perencanaan Beranda - Google Drive DATA BIDANG SDM SDA - Google Drive

https://drive.google.com/drive/folders/1-0X-HOPGqH4ubn_ZrBZT71_hIMgN-q5

Telusuri di Drive

Dibagikan kepada... > DATA BASE DPMD ... > DATA PERBID... > DATA BIDANG SDM...

Jenis Orang Dimodifikasi

Nama	Pemilik	Terakhir diubah	Ukuran file
DATA BUMDES	kantordpmd	24 Apr 2022 kantordpmd	—
DATA BUMDESMA	kantordpmd	24 Apr 2022 kantordpmd	—
DATA BKAD	kantordpmd	24 Apr 2022 kantordpmd	—
DATA KAWASAN PERDESAAN	kantordpmd	24 Apr 2022 kantordpmd	—
DATA DESTINASI WISATA	kantordpmd	21 Jul 2023 kantordpmd	—
DATA P2MP	kantordpmd	24 Jul 2023 lukmansappalle...	—

1,1 GB dari 15 GB telah digunakan

Dapatkan penyimpanan ekstra

DATA BIDANG SDM SDA

Detail Aktivitas

Yang memiliki akses

Miliki kantordpmd. Dibagikan kepada anas76.annas, DamayantiMuslimin, darmawatiMustafa, erwinlawa09, dan 10 lainnya.

Kelola akses

Detail folder

Jenis Folder Google Drive

Publikasi Dokumen LAKIP

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Luwu Timur

Melalui web dpmd@luwutimurkab.go.id

The screenshot displays the official website of the Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Luwu Timur. The page features a search bar at the top right with the text 'lakip' entered. Below the search bar, a table titled 'Hasil Penelusuran' (Search Results) lists four entries. The table has columns for 'No', 'Judul' (Title), 'Tahun' (Year), and 'Penerbit' (Publisher). The entries are as follows:

No	Judul	Tahun	Penerbit
3	Laporan Akuntabilitas Kinerja (Lakip) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2020 kabupaten Luwu Timur	2020	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
40	LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2022	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
43	LAKIP 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2022	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
60	LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2023	2023	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Below the table, it indicates 'Showing 1 to 4 of 4 entries (filtered from 84 total entries)'. The footer of the website contains contact information for the Kantor Pusat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Luwu Timur, including the address, phone number (0471) 3220186, and email address ppid@luwutimurkab.go.id. It also lists related links (LINK TERKAIT) such as Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia and Komisi Informasi Sulawesi Selatan, and social media links (MEDIA SOSIAL) for Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube.

